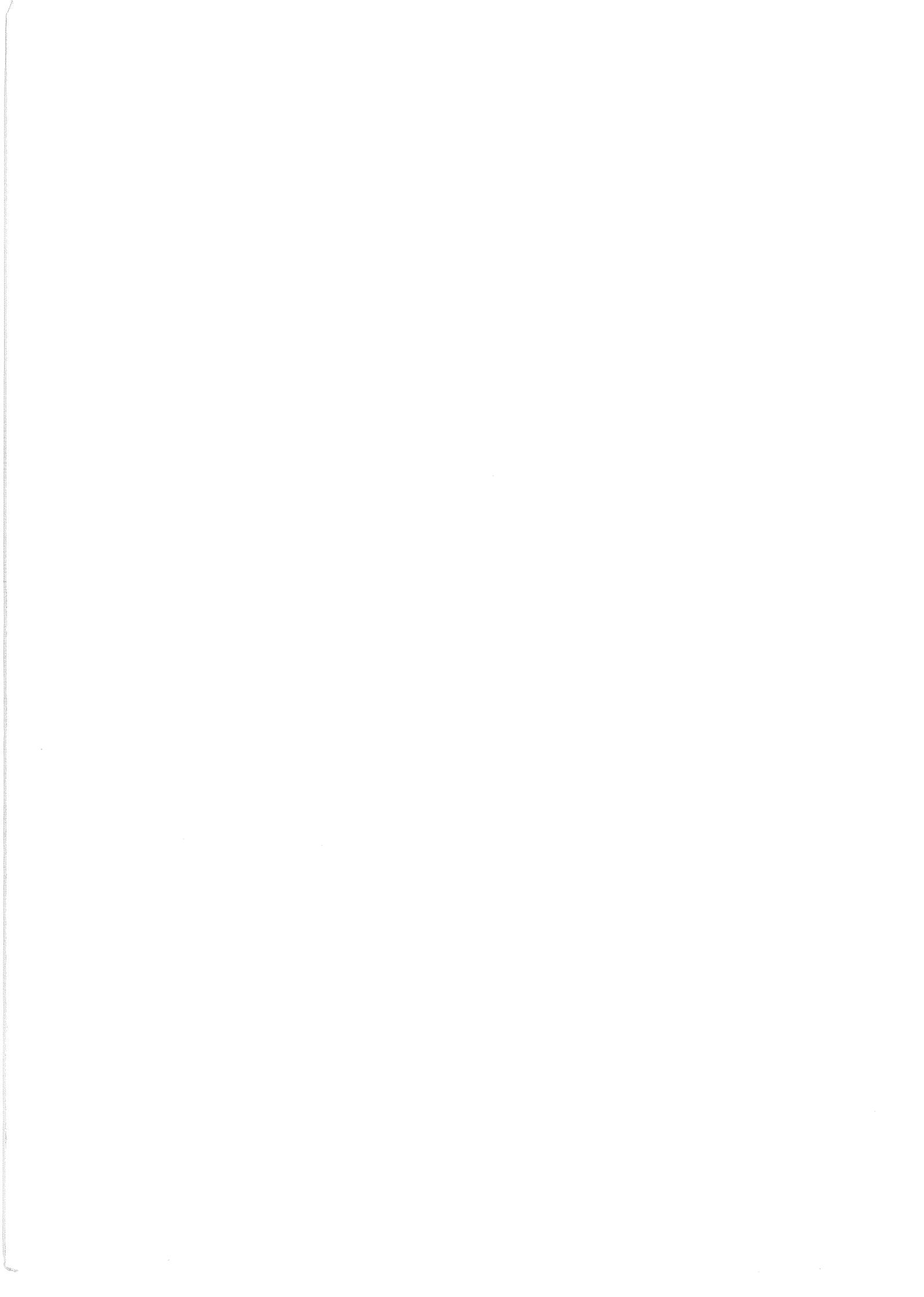
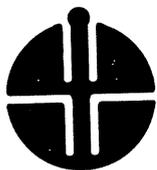


**MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR:
KONSEP DAN STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN**



**MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN
DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR:
KONSEP DAN STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN**

**Aswatini Raharto
Eniarti Djohan**



**PUSLITBANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 1999**

Raharto, Aswatini dan Djohan, Eniarti

Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Timur: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan. Penulis : Aswatini Raharto dan Eniarti Djohan. Jakarta: PPT-LIPI, 1999.

xv, 77 hlm, 29 cm. (Seri Penelitian PPT-LIPI No. 36/1999)

ISSN 0852-9280

1. Migrasi 2. Pembangunan Daerah Perbatasan 3. Kalimantan Timur
I. Judul II. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

MOBILITAS PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR:
Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan
Penulis : Aswatini Raharto dan Eniarti Djohan

Desain Sampul : Puji Hartana

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan oleh Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dicetak oleh CV. Bina Utama

KATA PENGANTAR

Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penikmat dari hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan masa kini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidup manusia sekarang ini dengan tidak mengganggu/membahayakan kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena ketersediaan sumberdaya alam tidak tanpa batas, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) disamping upaya pemanfaatan dan pengembangan teknologi.

Dilihat dari potensi yang dimiliki, daerah perbatasan Indonesia di beberapa wilayah seperti Sulawesi Utara, Irian Jaya dan Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Tetapi potensi sumberdaya manusianya masih kurang menguntungkan dilihat dari kualitas yang rendah, kuantitas serta persebarannya. Keadaan ini bertambah parah karena daerah perbatasan umumnya merupakan daerah yang rentan baik karena keterisolasiannya maupun kedekatannya dengan negara tetangga. Selain dari itu, daerah perbatasan di Indonesia umumnya merupakan daerah terpencil yang sulit dicapai sehingga masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan.

Salah satu permasalahan sosial demografis yang dihadapi daerah perbatasan di Indonesia berkaitan dengan mobilitas penduduk, baik mobilitas internal maupun

internasional. Permasalahan yang ditimbulkan bukan saja berkaitan dengan masalah persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung lingkungan tetapi juga berkaitan dengan masalah pengembangan wilayah dan pengembangan kualitas SDM.

Studi yang dilakukan Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI) di daerah perbatasan Indonesia di Propinsi Sulawesi Utara, Irian Jaya dan Kalimantan Timur merupakan salah satu usaha untuk memberi asupan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan. Asupan tentang alternatif strategi pembangunan dalam laporan ini disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah perbatasan dengan fokus utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia setempat.

Terlaksananya kegiatan studi sampai selesainya penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta di tingkat pusat maupun daerah, serta aparat dan masyarakat di daerah. Untuk itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Khusus kepada peneliti yang terlibat, yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan studi ini kami ucapkan selamat. Ucapan selamat dan terima kasih juga kami tujukan kepada staf administrasi dan para teknisi yang telah membantu menyelesaikan pelaksanaan kegiatan studi dan penulisan laporan ini.

Jakarta, Maret 1998

Kapuslitbang Kependudukan
dan Ketenagakerjaan – LIPI

DR. Yulfita Raharjo, MA
NIP: 320000878

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR PETA	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Tulisan	4
1.3. Sistematika penulisan	4
II. GAMBARAN UMUM DAERAH PERBATASAN	7
2.1. Kondisi Geografis	7
2.2. Kondisi Penduduk	12
2.3. Kondisi Sosial	19
2.4. Kondisi Ekonomi	34
III. PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN	37
3.1. Pembangunan Ekonomi	38
3.2. Pembangunan Sosial	44
3.3. Pembangunan Pertahanan Keamanan (Hankam)	53
IV. KONSEP DAN STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN: TINJAUAN SOSIAL-DEMOGRAFI	57
4.1. Isu dan Permasalahan	58

4.2. Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan Daerah Perbatasan	60
4.2.1. Prinsip Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Timur.	60
4.2.2. Pendekatan Pengembangan Strategi Alternatif	61
4.3. Kendala Pembangunan Daerah Perbatasan	71
V. PENUTUP	73
DAFTAR BACAAN	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kecamatan Wilayah DT II Bulungan dan Jumlah Desa Berbatasan Langsung dengan Negara Malaysia	8
Tabel 2.2 Penduduk Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten serta Kecamatan Wilayah Perbatasan Kabupaten Bulungan Menurut Jenis Kelamin	13
Tabel 2.3 Luas Wilayah, Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kotamadya, 1971, 1980, 1990 dan 1995	14
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1995	15
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Bulungan	26

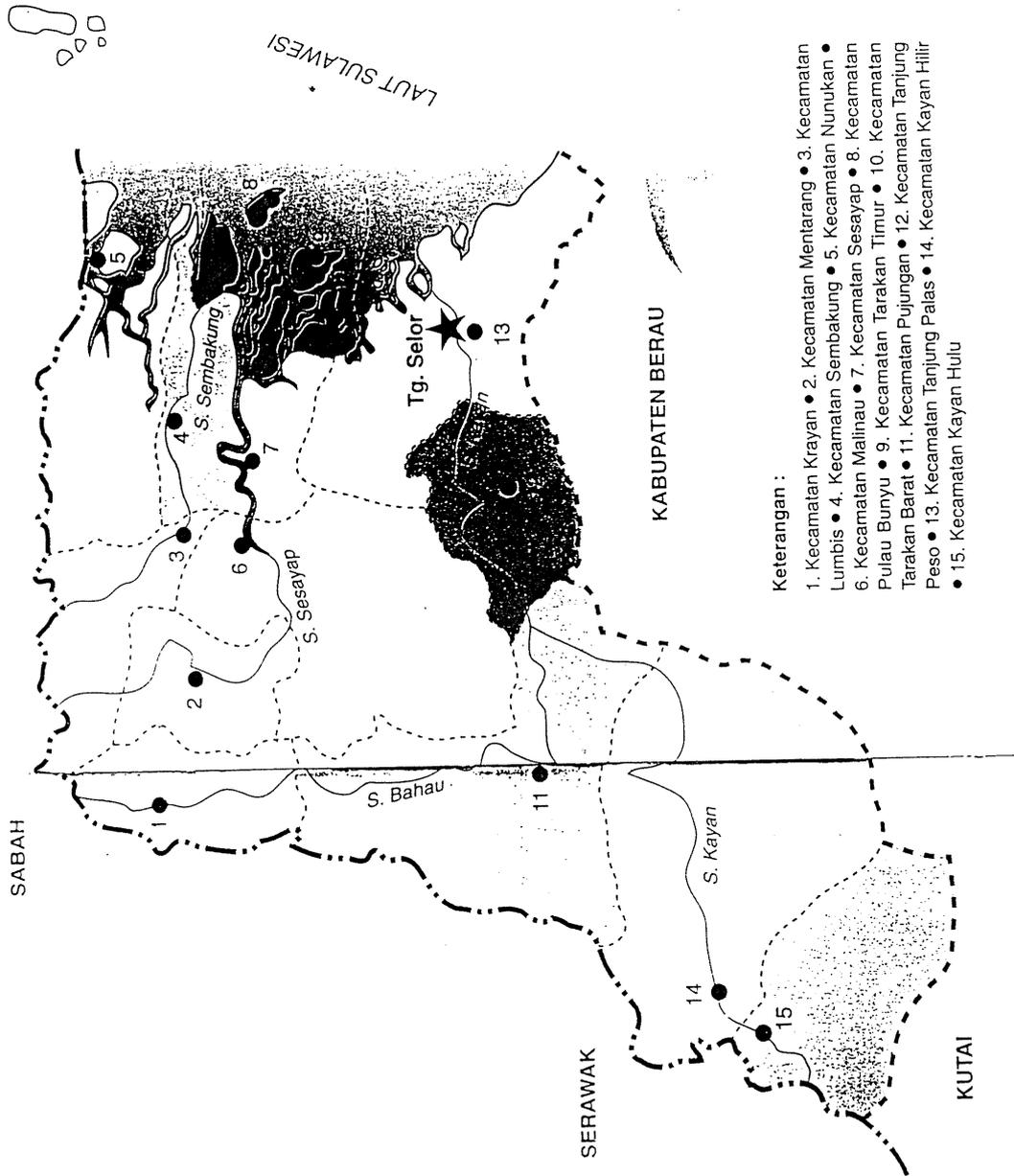
DAFTAR SKEMA

	Halaman
Skema 1 Alur Berpikir Analisa Jenjang Masalah	63
Skema 2.1 Matrik Pendekatan Untuk Pemecahan Masalah dalam Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kalimantan Timur (Usaha Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur)	64
Skema 2.2 Matrik Pendekatan untuk Pemecahan Masalah dalam Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kalimantan Timur Timur (Usaha Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur)	69

DAFTAR PETA

	Halaman
Peta 1 Kabupaten Bulungan	xv

Peta 1: Kabupaten Bulungan



Sumber: Pemda Kabupaten/Dati II Bulungan dan LKBN Antara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha untuk merubah keadaan masa lalu yang tidak sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia dengan tujuan agar dapat mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990). Ini menunjukkan bahwa manusia memegang peranan penting dalam pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun penikmat dari hasil pembangunan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan masa kini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup manusia sekarang ini dengan tidak mengganggu/membahayakan kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini merupakan isu kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (United Nations, 1995: 12). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, manusia, sumberdaya alam dan lingkungan harus dipertimbangkan secara berimbang. Karena keterbatasan sumberdaya alam, untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) disamping upaya pemanfaatan dan pengembangan teknologi.

Propinsi Kalimantan Timur mempunyai kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, tetapi potensi sumberdaya manusia yang tersedia masih kurang menguntungkan dilihat dari kuantitas, kualitas dan pesebarannya. Keadaan ini bertambah parah di daerah perbatasan, yang dapat dianggap sebagai daerah rentan baik karena keterisolasiannya maupun kedekatannya dengan negara tetangga. Daerah perbatasan di Indonesia umumnya merupakan daerah terpencil yang sulit dicapai sehingga masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Tetapi, daerah ini merupakan tempat masuk pengaruh-pengaruh dari luar karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga dapat merupakan sumber konflik maupun pengaruh positif. Dengan demikian masalah yang dihadapi di daerah perbatasan menjadi kompleks.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten perbatasan di Propinsi Kalimantan Timur. Wilayah perbatasan di kabupaten ini mencakup perbatasan pantai dan daratan yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak, Kerajaan Malaysia. Wilayah ini mempunyai sumberdaya alam yang besar. Sumberdaya alam yang potensial untuk menunjang pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur termasuk sumberdaya hutan dengan potensi hasil seperti rotan, kayu, bambu, gaharu; hasil pertambangan, dan sumberdaya laut. Tetapi, seperti kondisi di Propinsi Kalimantan Timur umumnya, keterbatasan sumberdaya manusia juga merupakan kendala yang dihadapi untuk pengembangan wilayah ini. Persebaran penduduknya masih sangat tidak merata dengan kepadatan penduduk yang juga sangat rendah. Tingkat pendidikan penduduknya juga sangat rendah, sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Dasar kebawah. Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya manusia di Kabupaten Bulungan, sebagai daerah perbatasan, dilihat dari kuantitas, persebaran dan kualitasnya masih sangat memprihatinkan.

Salah satu permasalahan sosial demografi yang dihadapi wilayah perbatasan ini adalah masalah yang berkaitan dengan mobilitas penduduk, baik mobilitas internal maupun internasional. Khususnya untuk daerah perbatasan di Kabupaten Bulungan, potensi sumberdaya alam yang kaya tampaknya merupakan salah satu alasan besarnya

arus migrasi masuk dari propinsi lain. Tetapi, ketimpangan pembangunan di wilayah ini juga mengakibatkan perpindahan penduduk lokal secara berangsur-angsur meninggalkan desa-desa di wilayah perbatasan menuju daerah permukiman baru yang relatif memiliki hubungan lebih mudah ke perkotaan, baik di wilayah Indonesia maupun wilayah negara tetangga (Malaysia). Ini mengakibatkan beberapa daerah di wilayah perbatasan menjadi kosong.

Karena letaknya yang berbatasan dengan Malaysia, beberapa daerah di wilayah perbatasan ini juga menjadi pintu masuk dan keluar arus mobilitas penduduk internasional antara Indonesia dan Malaysia, baik secara legal maupun ilegal. Dua kecamatan yang penting sebagai pintu masuk dan keluar arus mobilitas penduduk ini adalah Kecamatan Nunukan dan Sebatik. Kecamatan Nunukan merupakan daerah persinggahan (transit) terpenting bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan menyebrang ke Malaysia, khususnya ke Negara Bagian Sabah. TKI ini berasal dari Propinsi Kalimantan Timur sendiri maupun propinsi-propinsi lain di Indonesia terutama Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Tingginya arus mobilitas tenaga kerja internasional ini menimbulkan masalah sosial di daerah perbatasan ini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mobilitas penduduk di wilayah perbatasan sangat penting sebab bukan saja berkaitan dengan masalah persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung wilayah tetapi juga berkaitan dengan masalah pengembangan wilayah dan pengembangan kualitas SDM setempat. Kebijakan-kebijaksanaan pembangunan yang tidak bertujuan untuk intervensi pada persebaran penduduk dapat mempunyai dampak yang besar pada pola mobilitas serta persebaran penduduk wilayah perbatasan. Ketidak mampuan SDM setempat memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan lestari untuk mendukung program-program pembangunan yang ada membuka kesempatan pendatang untuk memanfaatkannya, meskipun, adanya mobilitas penduduk masuk juga akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM setempat. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat serta kelestarian sumberdaya alam yang ada.

1.2. Tujuan tulisan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian Masalah Kependudukan di Daerah Perbatasan yang dilakukan oleh Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPT-LIPI) di Propinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sebagai alternatif strategi dalam meningkatkan usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Bulungan, yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dalam pengembangan strategi alternatif ini, selain aspek kesejahteraan, pertahanan keamanan dan kerjasama dengan negara tetangga juga akan dilihat aspek kependudukan yang menyangkut mobilitas penduduk. Tinjauan aspek mobilitas penduduk penting dalam pengembangan alternatif strategi pembangunan dari tinjauan sosial demografi karena studi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa mobilitas penduduk ini, baik internal maupun internasional, sangat dipengaruhi dan berpengaruh terhadap keadaan, sosial, ekonomi dan politik di daerah perbatasan.

1.3. Sistematika penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pentingnya serta tujuan penyusunan konsep dan strategi alternatif pembangunan daerah perbatasan. Bab dua dari tulisan ini berisi uraian tentang potensi yang dimiliki daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Bulungan di Propinsi Kalimantan Timur. Potensi daerah perbatasan ini dilihat dari aspek geografi, kependudukan, sosial dan ekonomi. Pada Bab tiga dari tulisan ini diuraikan tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah serta hasil yang sudah dicapai. Berdasarkan analisa Bab dua dan Bab tiga disusun konsep dan strategi alternatif pembangunan daerah pada Bab empat. Penyusunan konsep dan strategi alternatif pada bab empat ini dimaksudkan untuk memberikan

asupan tentang alternatif-alternatif strategi pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah perbatasan dengan fokus utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) setempat.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PERBATASAN

Bagian ini menggambarkan beberapa kondisi yang ada di masyarakat perbatasan Kalimantan Timur dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek geografis, penduduk, sosial, dan ekonomi. Uraian yang lebih rinci, difokuskan pada dua Kecamatan yang sangat dekat dengan wilayah Malaysia (Tawau, Negara Bagian Sabah), yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik.

2.1. Kondisi Geografis

Propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, baik dengan Negara Bagian Sabah maupun Negara Bagian Sarawak. Di antara Daerah Tingkat II, Kabupaten Bulungan mempunyai wilayah terluas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan yang ada di sekitar Laut Sulawesi. Daerah perbatasan bagian daratan berbentuk memanjang dari utara ke selatan, yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, yaitu sepanjang ± 1.032 Km.

Total luas wilayah perbatasan ini \pm 47,486 Km², yaitu 22,69 persen dari luas Propinsi Kalimantan Timur.

Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang banyak memiliki wilayah berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, yaitu sebelah barat dengan Negara Bagian Sarawak dan sebelah Utara dengan Negara Bagian Sabah. Ada tiga karakteristik wilayah perbatasan, yaitu wilayah daratan di Pulau Kalimantan, wilayah daratan di daerah Pulau Nunukan dan Sebatik)¹, dan wilayah perairan yang ada juga di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 75.724 Km² yang terdiri dari 15 kecamatan, 430 desa (Kantor Statistik Kalimantan Timur, 1996:29). Struktur pemerintahan ini berubah pada tahun 1997 sesuai dengan berubahnya status Tarakan menjadi kotamadya, dan Pulau Sebatik terpisah dengan Kecamatan Nunukan menjadi daerah kecamatan sendiri². Berubahnya Sebatik menjadi kecamatan, maka jumlah wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ada 9 kecamatan terdiri dari 23 desa. Tabel 2.1 menggambarkan wilayah kecamatan perbatasan, jumlah desa yang mempunyai batas-batas langsung dengan wilayah Malaysia serta ada/tidaknya pos migrasi di wilayah tersebut.

Tabel 2.1.: Kecamatan Wilayah DT II Bulungan dan Jumlah Desa Berbatasan Langsung dengan Negara Malaysia

Kecamatan	Jumlah Desa Perbatasan	Pos	Keterangan
Mentarang	3	Tidak ada	
Kayan Hulu	14	Tidak ada	
Kayan Hilir	5	Tidak ada	
Pujungan	23	Tidak ada	
Krayan	89	Ada	
Lumbis	77	Ada	
Nunukan	3	Ada	
Sebatik	2	Ada	Menjadi Kecamatan Tahun 1997

Sumber: Penelitian Mobilitas Penduduk Di Daerah perbatasan Kalimantan Timur, PPT-1997/1998

¹ Karakteristik yang hampir sama ada juga di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang masih merupakan persengketaan internasional antara Indonesia dengan Malaysia. Permasalahan ini sudah berada dalam pengurusan Mahkamah Internasional.

² Data setelah terjadi perubahan belum ada, maka dalam tulisan ini digunakan data terbaru sebelum terjadi pemisahan wilayah terjadi

Data di atas menunjukkan bahwa separuh dari wilayah kecamatan tidak mempunyai pos perbatasan, terutama daerah kecamatan di Kalimantan daratan (*mainland*). Pembentukan pos perbatasan ini mengindikasikan, bahwa layanan yang diberikan masih diprioritaskan untuk daerah yang diduga mempunyai nilai ekonomi penting, khususnya untuk pengaturan masalah ketenagakerjaan. Sedangkan untuk daerah pelintas batas tradisional umumnya belum ada pelayanan pos lintas batas. Mengingat daerah pedalaman Pulau Kalimantan daratan merupakan daerah yang potensial untuk industri kayu dan eksploitasi sumberdaya alam lain, perlu diantisipasi masalah pelintasan batas di daerah ini pada masa yang akan datang.

Dalam mengatasi permasalahan di atas, pemikiran pembentukan pos lintas batas dan pos keamanan diperlukan agar dapat menanggulangi berbagai usaha pencurian kayu dan sumberdaya alam lainnya dari kedua belah pihak, maupun usaha-usaha ilegal lainnya. Namun kondisi geografis wilayah perbatasan, terutama bagian daratan sulit ditempuh karena luas dan rapatnya hutan di wilayah tersebut. Topografi daerah perbatasan bagian daratan terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan. Misalnya wilayah Kecamatan Krayan dan Kecamatan Long Apari dan Long Pahangi (perbatasan bagian selatan) umumnya bergunung-gunung atau bergelombang, berbukit-bukit, dan di antara bukit-bukit terdapat daerah yang relatif rendah. Daerah landai ada di sepanjang Sungai Mahakam dan Sungai Kayan beserta anak sungainya. Keberadaan sungai-sungai ini mempunyai peran penting sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lain, karena belum ada jalan darat yang dapat menghubungkan antara desa atau wilayah lain di bagian daratan ini; kecuali udara dan sungai. Misalnya, Sungai Mahakam bisa dilayari '*long boat*' sepanjang 404 Km, yaitu dari Samarinda sampai Long Iram - Long Bagun - Long Apari; Sungai Kayan dari Tanjung Selor sampai Long Peso - Long Pujungan; Sungai Sebakung dapat dilayari sampai ke Mensalong dan Labang.

Perbatasan wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik, mempunyai karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan. Kecamatan Nunukan terdiri dari wilayah Pulau Nunukan dan sebagian masuk dalam wilayah

mainland Pulau Kalimantan, sedang Kecamatan Sebatik hanya mencakup sebagian daerah Pulau Sebatik. Dilihat dari geografi fisik, wilayah Kecamatan Nunukan terdiri dari dua wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda yaitu wilayah daratan Nunukan dan wilayah perairan, yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya alam dan aktivitas masyarakat. Wilayah daratan mempunyai hutan hujan tropis yang lebat dengan ciri permukiman penduduk mengikuti aliran sungai. Berbeda dengan wilayah Pulau Nunukan yang terdiri dari dua karakteristik, yaitu penduduk yang menetap di daerah Nunukan kota dan penduduk yang berada 'jauh dari kota'. Permukiman penduduk mengikuti pola jalan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan memudahkan penggunaan akses jalan.

Kondisi geografi Kecamatan Sebatik tidak berbeda jauh dengan Nunukan daratan. Daerah ini bulan April 1997 baru menjadi kecamatan, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Nunukan. Pulau Sebatik terbagi dua, yaitu bagian utara masuk wilayah Malaysia dan selatan wilayah Indonesia. Daerah ini menjadi bagian penting dari dinamika daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya dalam hubungan dengan pelabuhan Tawau, mengingat jarak yang sangat dekat, yaitu sekitar 15 menit menggunakan kapal motor (*boat*).

Secara fisik, Pulau Sebatik bagian Indonesia merupakan wilayah yang potensial untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Tanaman pangan yang cukup dominan di Sebatik adalah padi dengan sawah tadah hujan dan tanaman palawija, sedangkan perkebunan yang potensial adalah tanaman coklat yang menjadi basis ekonomi bagi penduduk Sebatik. Penduduk yang menganggap dirinya sebagai 'penduduk asli' pada umumnya mempunyai kebun coklat dalam berbagai tingkatan luas.

Permukiman penduduk di Kecamatan Sebatik mengelompok di lima desa, yaitu Desa Setabu, Desa Sungai Nyamuk, Desa Sungai Pancang, Desa Tanjung Aru dan Desa Tanjung Karang. Desa-desa ini satu dan lainnya dihubungkan oleh satu jalan tembus yang mengitari pulau dengan kondisi baik di dalam kota, namun mulai buruk di bagian luar kota kecamatan. Jalan ini merupakan akses penting, terutama dalam pengangkutan berbagai hasil pertanian. Untuk kepentingan lalu lintas Sebatik – Tawau banyak *boat*

yang dapat disewa. Khusus untuk penduduk yang tinggal di Kampung Aji Kuning yang umumnya pedagang sayur, bila ke Tawau langsung melalui Sungai Aji Kuning sebagai pintu masuk ke wilayah Malaysia dengan transportasi *boat*.

Wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan Sabah, kondisi geografi fisiknya tidak jauh berbeda dengan kondisi fisik perbatasan wilayah Sabah, terutama berkaitan dengan sumberdaya alam. Perbedaan yang ada terletak pada tingkat pemanfaatan sumberdaya tersebut. Hutan-hutan di wilayah Sabah sebagian besar telah berubah menjadi daerah agroindustri seperti coklat dan kelapa sawit. Sementara wilayah Indonesia kondisinya masih baik, dipenuhi dengan hutan tropis yang padat beserta satwa langka yang terancam punah karena pemanfaatan hutan yang tidak terkendali baik yang tercuri oleh 'oknum' pemasok kayu ke wilayah Sabah, maupun kebutuhan industri perkayuan di pihak Indonesia.

Kondisi ini terjadi juga di wilayah kepulauan seperti Pulau Sebatik yang wilayah daratannya juga berbatasan langsung dengan Sabah. Hutan-hutan yang ada makin punah sejalan dengan adanya kecenderungan penduduk, khususnya pendatang, melakukan perluasan perkebunan coklat, pisang, dan terakhir berencana untuk kelapa sawit. Untuk masyarakat pulau ini, tanaman coklat dan pisang menjadi komoditi utama yang dipasarkan langsung ke Sabah (Tawau). Pengurangan wilayah hutan di pulau ini terjadi juga dengan makin meluasnya permukiman penduduk, terutama di sepanjang jalan lingkar yang sedang dibangun di Pulau Sebatik. Gambaran hutan ini sudah tidak terlihat di Pulau Nunukan, kecuali hutan bakau yang luas dan tumbuh subur di sepanjang pantai. Gambaran hutan bakau ini pun terlihat subur di sepanjang pantai Pulau Sebatik. Kondisi hutan masih baik, antara lain karena pantainya berlumpur, landai, dan terjadi pasang-surut air laut pada waktu-waktu tertentu. Keberadaan hutan bakau ini menunjang kehidupan fauna darat maupun komunitas laut, antara lain tempat bertelur udang, kepiting, dan ikan, serta bertenggernya burung dan monyet.

Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah kepulauan ini adalah sumberdaya laut dengan berbagai macam jenis ikan. Sayangnya keberadaan komunitas

laut ini tidak memberikan keuntungan maksimum pada penduduk setempat, karena hasil tangkapan di Sebatik hanya lewat dan langsung dijual kepada para tauke di Tawau. Bahkan penduduk Sebatik juga membeli ikan di Pasar Tawau, yang berasal dari Indonesia.

2.2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1995 jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Timur adalah 2.314.183 jiwa, yaitu laki-laki 1.192.032 jiwa dan perempuan 1.122.151 (Tabel 2.2.). Dengan luas wilayah daratan 211.440 Km², tingkat kepadatan penduduk relatif rendah yaitu mendekati 11 jiwa per Km². Tingkat pertumbuhan penduduk propinsi Kalimantan Timur secara umum cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan dari 5,63 persen per tahun pada periode 1971-1980 menjadi 4,21 persen pada periode 1990-1995. Salah satu faktor penyebab tingginya angka pertumbuhan penduduk ini adalah karena tingginya angka migrasi masuk ke propinsi ini. Potensi sumberdaya alam yang kaya di propinsi ini tampaknya merupakan salah satu alasan besarnya arus migrasi masuk dari propinsi lain (Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi, FU-UI, 1998: 165).

Bila dibandingkan antara jumlah penduduk di pedesaan dan perkotaan di Propinsi Kalimantan Timur, pada tahun 1995 hanya 49,8 persen yang berdiam di pedesaan. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rata-rata penduduk pedesaan secara nasional, yaitu 64,1 persen (Biro Pusat Statistik, 1996). Salah satu penyebabnya, karena makin banyak penduduk yang melakukan migrasi ke kota untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Untuk tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia memperlihatkan, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kutai terbanyak yaitu 641.482 jiwa, diikuti Kabupaten Pasir 232.893 jiwa dan Kabupaten Bulungan 176.741 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Kutai dan Kabupaten Pasir, selain kondisi geografis yang dekat dengan ibu kota propinsi

(Samarinda) dan Kota Balikpapan, mungkin juga dipengaruhi faktor migrasi penduduk pencari kerja di pertambangan yang banyak tersebar di dua kabupaten tersebut, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, batu kapur, dan kaolin (Anonim, 1992:210-215).

Untuk Kabupaten Bulungan, pertumbuhan penduduknya antara tahun 1990-1995 sekitar 2,65 persen. (Dihitung dari Kantor Statistik Kabupaten Bulungan, 1997: Tabel IV.1.4). Ini dapat menjadi indikasi rendahnya tingkat migrasi masuk dibandingkan ke Kalimantan Timur secara umum. Kecamatan perbatasan di Kabupaten Bulungan seperti Kayan Hulu, Kayan Hilir, Mentarang dan Nunukan mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif lebih besar dari Kabupaten Bulungan. Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, meskipun tingkat pertumbuhan penduduknya relatif tinggi, tetapi jumlah penduduknya sangat sedikit sehingga kepadatan penduduknya juga sangat rendah. Pada tahun 1995, kepadatan penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir kurang dari satu jiwa/km², sedangkan untuk Kecamatan Nunukan sekitar 7 jiwa/km².

Tabel 2.2: Penduduk Propinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten serta Kecamatan Wilayah Perbatasan Kabupaten Bulungan Menurut Jenis Kelamin

Wilayah	KK	Laki-laki	Perempuan	Total	Kepadatan
Propinsi Kalimantan Timur	398.849 *)	1.192.032**)	1.122.151**)	2.314.183**)	
Kabupaten Kutai	137.218*)	335.169	306.313	641.482**)	
Kabupaten Pasir	46.731*)	121.797	111.096	232.893**)	
Kabupaten Bulungan (di luar Tarakan)	47.001*)	91.071	85.670	176.741**)	
Kecamatan Kayan Hilir	214	550	533	1.083***)	
Kecamatan Kayan Hulu	966	2.473	2.452	4.925	
Kecamatan Pujungan	562	1.525	1.545	3.070	
Kecamatan Kerayan	1.686	4.500	4.433	8.933	
Kecamatan Lumbis	1.403	3.374	3.371	6.745	
Kecamatan Nunukan	6.313	18.251	16.037	34.288****)	4920 Km ²
Kecamatan Sebatik	4.115	11.004	9.318	20.322****)	230 Km ²

Sumber: *)Sensus Penduduk 1990; **) Supas 1995; ***) Data Kecamatan wilayah Kabupaten Bulungan berasal dari Kantor Statistik Kabupaten Bulungan; ****) Data Kecamatan Nunukan tahun 1997; Data Kecamatan Sebatik Nopember 1997.

Wilayah Kabupaten Bulungan mencakup kira-kira 33 persen dari seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Tetapi pada tahun 1995, hanya 11,4 persen dari total penduduk Propinsi Kalimantan Timur tinggal di kabupaten ini. Dari tahun 1971 terlihat bahwa proporsi penduduk yang tinggal di Kabupaten Bulungan terus menurun dan kepadatan penduduknya hanya meningkat sedikit (Tabel 2.3). Untuk Kabupaten Bulungan, Kecamatan Sebatik merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk 88 jiwa/km² (tahun 1997). Selain Kecamatan Nunukan, dengan kepadatan penduduk rata-rata 7 jiwa/km² pada tahun 1997, kecamatan perbatasan lainnya di Kabupaten Bulungan mempunyai kepadatan penduduk antara 1-3 jiwa/km². Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya manusia Propinsi Kalimantan Timur secara umum dan Kabupaten Bulungan khususnya, sebagai daerah perbatasan, dilihat dari kuantitas dan persebarannya masih sangat memprihatinkan.

Tabel 2.3. Luas wilayah, persebaran dan kepadatan penduduk Kalimantan Timur menurut kabupaten/kotamadya, 1971, 1980, 1990 dan 1995

Kabupaten /Kodya	Wilayah		Persebaran penduduk (%)				Kepadatan penduduk/Km ²			
	Km2	%	1971	1980	1990	1995	1971	1980	1990	1995
Pasir	15.150	7,2	7,8	10,5	11,2	11,7	3,8	8,4	13,9	17,9
Kutai	97.936	46,3	34,1	32,7	33,0	33,0	2,6	4,1	6,3	7,8
Berau	25.328	12,0	4,4	3,8	3,3	3,1	1,3	1,8	2,5	2,8
Bulungan	71.769	33,9	16,2	14,5	12,4	11,4	1,7	2,5	3,2	3,8
Balikpapan	620	0,3	18,7	19,3	18,4	17,8	221,5	378,4	555,5	665,5
Samarinda	637	0,3	18,8	19,3	21,7	22,9	216,3	368,0	639,4	832,4
Jumlah	211.440	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,5	5,8	8,9	10,9

Sumber: - Biro Pusat Statistik, 1993 dalam Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi, FE-UI, 1998.

- Biro Pusat statistik, 1996.

Tingginya pertumbuhan dan kepadatan penduduk (relatif terhadap kecamatan perbatasan lainnya) di Kecamatan Nunukan erat kaitannya dengan tingginya migrasi masuk ke kecamatan ini, yang mungkin berkaitan dengan kedudukan Nunukan sebagai kota transit bagi tenaga kerja dari Indonesia yang akan pergi/bekerja di Malaysia dan juga karena pengikut program transmigrasi di beberapa daerah seperti di sekitar Tanjung Selor, Selimau, dan Simanggaris. Penduduk Kecamatan Nunukan adalah 34.288 jiwa, dan jumlah ini bertambah pada saat banyaknya calon pekerja dari propinsi lain yang akan ke Tawau dan transit di Nunukan. Begitupula dengan

Kecamatan Sebatik yang juga menunjukkan penambahan penduduk. Menurut data tahun 1997 ada 20.322 jiwa, namun tahun 1998 bertambah menjadi 21.175 jiwa. Pertambahan ini antara lain dapat disebabkan karena kembalinya para pekerja dari Tawau (yang sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur) akibat PHK, namun tidak ingin kembali ke daerah asal, tetapi memilih menetap di Sebatik..

Usia penduduk Propinsi Kalimantan Timur, menunjukkan struktur penduduk yang tidak berbeda dengan penduduk Indonesia umumnya, yaitu berbentuk piramida dengan landasan melebar (usia muda) kemudian membentuk kerucut pada usia lanjut. Kondisi ini menggambarkan, bahwa pembangunan di sebagian wilayah Kalimantan masih harus terfokus pada sarana pendidikan untuk penduduk usia muda (tidak produktif) dan sarana kesehatan bagi semua usia, khusus penduduk tidak produktif (anak-anak dan lansia). Tabel 2.4 menunjukkan penduduk Kalimantan Timur menurut umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.4: Jumlah Penduduk Kalimantan Timur Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 1995

Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	N	%	N	%	N	%
0 – 9	281.646	23,6	263.354	23,5	545.000	23,6
10 – 14	142.640	12,0	140.461	12,5	283.101	12,2
15 – 24	231.984	19,5	233.446	20,8	465.430	20,1
25 – 49	437.359	36,7	391.398	34,9	828.757	35,8
50 – 64	70.689	5,9	69.999	6,2	140.688	6,1
65 +	27.714	2,3	23.493	2,1	51.207	2,2
TOTAL	1.192.032	100,0	1.122.151	100,0	2.314.183	100,0

Sumber: Survei penduduk antar sensus tahun 1995

Dilihat dari kualitasnya, pada tahun 1995, kira-kira 63 persen penduduk Propinsi Kalimantan Timur yang berumur 10 tahun keatas berpendidikan Sekolah Dasar kebawah (termasuk sebanyak 8 persen yang tidak pernah sekolah). Untuk Kabupaten Bulungan, proporsi ini sebesar 70 persen. Ini menunjukkan rendahnya kualitas SDM di wilayah ini. Di Pulau Nunukan, sebagai salah satu wilayah

kecamatan perbatasan yang teramai, pendidikan penduduk usia produktif juga sangat rendah, lebih dari 80 persen berpendidikan SD kebawah (Bappeda TK. I Kaltim bekerja sama dengan BPPT, 1993). Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa di daerah perbatasan lainnya yang lebih terisolir keadaannya tidak lebih baik. Menurut jenis kelamin tingkat pendidikan perempuan masih rendah dibanding laki-laki. Dari total perempuan usia 10 tahun ke atas (858.797 jiwa) ada 31,9 persen yang berhasil menamatkan pendidikan di tingkat sekolah lanjutan pertama ke atas, sedang laki-laki (910.386 jiwa) ada 41,9 persen (Biro Pusat Statistik, 1996:28-29). Kondisi pendidikan penduduk ini menunjukkan, bahwa pendidikan masih cukup mahal untuk dinikmati penduduk daerah perbatasan.

Ada tiga lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur, yaitu sektor industri, sektor jasa pemerintahan dan sektor perdagangan (besar, non-formal, dan rumah makan). Industri besar dan sedang mencerminkan usaha-usaha pertambangan seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas dan nikel yang kandungan dasarnya banyak ditemui di Kalimantan Timur. Kegiatan ini tidak saja menyerap tenaga setempat tapi juga dari luar propinsi, bahkan mungkin lebih banyak pendatang. Sedang lapangan pekerjaan pertanian meliputi persawahan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan yang lebih banyak dilakukan masyarakat lokal serta pendatang transmigrasi.

Pada masyarakat perbatasan, terutama penduduk kawasan perbatasan di daratan Pulau Kalimantan, kegiatan pertanian yang dilakukan lebih kepada kegiatan perladangan tradisional, mencari kayu di hutan, sektor perdagangan informal, perikanan dengan peralatan tradisional, dan pencarian sarang burung walet di sepanjang perbatasan Simanggaris (Gunung Mayan). Perladangan tradisional masih dilakukan sebagaimana pola yang ada pada masyarakat Dayak umumnya, yaitu pola berpindah berdasarkan waktu tertentu dan pola exodus sampai daerah yang dituju. Perdagangan informal, di samping usaha-usaha kecil di tempat, ada yang melakukan perdagangan dengan masyarakat di wilayah Malaysia (seberang). Pencarian sarang burung walet, walaupun dilarang masih banyak yang melakukan secara sembunyi

karena komoditi ini bisa memberi pendapatan yang menjanjikan bagi kehidupan penduduk. Data kuantitatif dari pola pekerjaan masyarakat perbatasan di daratan ini belum ada karena studi langsung di wilayah tersebut boleh dikatakan 'belum ada'.

Kasus di masyarakat perbatasan di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik menunjukkan, bahwa penduduk banyak melakukan kegiatan transaksi dagang dengan penduduk Malaysia karena barang-barang dari Malaysia lebih murah dibandingkan jika membeli dari Kota Samarinda, Balikpapan, atau Tanjung Selor. Orang Sebatik akan membawa hasil kebun (sayuran) dan ikan untuk dijual di Tawau, kembalinya akan membawa barang-barang makanan kaleng seperti susu dan kue-kue kering, roti, gula, beras, dan minyak goreng. Namun dengan adanya krisis moneter (Krismon) di Indonesia dan Malaysia, membuat barang produksi Indonesia lebih murah dibanding Malaysia. Pada saat itu banyak barang Indonesia masuk ke Tawau baik dalam jumlah kecil, maupun jumlah besar secara ilegal. Dampak ini terasa di Kecamatan Sebatik tahun 1998, di mana toko-toko lebih dipenuhi produksi Indonesia dibanding produksi Malaysia. Kondisi ini berbeda dengan tahun 1997 yang memperlihatkan lebih banyak produksi Malaysia di Sebatik.

Perkembangan penduduk Propinsi Kalimantan Timur tercermin juga dari keanekaragaman suku bangsa, baik yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli atau pendatang. Pada dasarnya, penduduk Kalimantan Timur dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok Melayu dan kelompok Dayak. Kelompok pertama tinggal di daerah pesisir pantai dan sepanjang tepi sungai atau sepanjang sungai yang beraliran tidak deras, antara lain Sukubangsa Bulungan, Tidung, Berau, Bayau, Kutai, dan Banjar yang datang belakangan (Anonim, 1992:89). Pada saat ini, suku-suku tersebut mengelompok pada daerah-daerah tertentu misalnya Sukubangsa Banjar di Kota Samarinda dan Balikpapan, Sukubangsa Dayak di Kutai dan sepanjang wilayah perbatasan, Sukubangsa Bulungan di Kabupaten Bulungan, dan Sukubangsa Tidung di wilayah pantai timur bagian utara Pulau Kalimantan. Suku-suku pendatang pada umumnya berada di pusat-pusat kota dan daerah transit menuju wilayah Malaysia seperti Balik Papan, Samarinda, Tarakan, Bulungan, Nunukan serta daerah-daerah

transmigrasi. Kelompok pendatang ini yang dominan adalah Sukubangsa Bugis-Makasar, Sukubangsa Toraja, Suku-suku dari Propinsi NTT, dan Sukubangsa Jawa. Para pendatang ini ada yang sudah tinggal secara turun temurun, ditugaskan pemerintah, turut program transmigrasi, pencari kerja ke Negara Malaysia, atau bekerja di sektor informal.

Di antara beberapa sukubangsa yang ada di Kalimantan Timur di atas, untuk kawasan perbatasan daratan di domininasi oleh Sukubangsa Dayak, Bulungan dan Tidung, sedang kawasan perbatasan kepulauan di dominir Sukubangsa Tidung. Namun keberadaan Sukubangsa Tidung ini makin tergeser dengan kehadiran suku pendatang Bugis, Toraja dan suku-suku NTT di Pulau Nunukan dan Suku Bugis di Pulau Sebatik. Kelompok Suku Tidung di Pulau Nunukan sangat terbatas, yaitu ± 25 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Nunukan. Tempat kediaman mereka di sisi pulau yang termasuk wilayah Sungai Bilal dengan aktifitas sebagai petani dan nelayan, sehingga tidak mencolok seperti suku-suku pendatang. Suku Tidung di Pulau Sebatik banyak tinggal di Desa Setabu dengan kegiatan ekonomi di pertanian dan nelayan sekitar perairan Sebatik – Nunukan.

Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Propinsi Kalimantan Timur juga berdampak juga terhadap penggunaan bahasa penduduk Kalimantan Timur. Bahasa Banjar banyak dijumpai di kota Samarinda dan Balikpapan di mana suku ini banyak berdomisili, bahasa Dayak di kawasan perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai, bahasa Tidung dan Bulungan di daerah Tanjung Selor dan wilayah kepulauan bagian utara yang pernah menjadi daerah Kerajaan Bulungan dan Tidung. Penggunaan bahasa Tidung banyak juga digunakan oleh masyarakat Malaysia yang pernah punya hubungan dengan orang Tidung.

Selain bahasa penduduk setempat, bahasa pendatang pun banyak digunakan terutama dimana kelompok asal pendatang itu berada. Misalnya di Pulau Nunukan dijumpai kelompok orang NTT, Toraja, dan Jawa yang sehari-hari masih menggunakan bahasa daerah tempat asal. Pengguna bahasa Bugis dan Makasar tidak terbatas, karena hampir disetiap tempat dijumpai orang asal Bugis dan Makasar.

Bahasa lain yang juga mendominasi dua pulau perbatasan tersebut adalah 'bahasa Melayu', sehingga berada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik seakan-akan ada di Negara Malaysia.

Dari sisi agama, penduduk Kalimantan Timur yang paling dominan adalah pemeluk Agama Islam yaitu sebesar 83,2 persen dari 2.041.221 jiwa (tahun 1995). Dibanding tiga kabupaten yang ada di wilayah perbatasan, pemeluk Agama Islam di Kabupaten Bulungan paling kecil jumlahnya yaitu 63,3 persen dari total penduduk kabupaten Bulungan (251.153 jiwa). Namun, untuk pemeluk Agama Kristen Protestan lebih tinggi (37,9 persen) dibanding dengan tingkat propinsi (9,5 persen). Kondisi ini disebabkan karena Orang Dayak yang dominan pemeluk Agama Kristen Protestan banyak berdomisili di wilayah Kabupaten Bulungan, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan bagian daratan (Kantor Statistik Kalimantan Timur, 1996:162).

Orang Tidung yang beragama Islam, menganggap dirinya sebagai pemeluk Agama Islam fanatik, dan lebih kuat dibanding suku lain. Namun sampai saat ini sangat jarang terdengar konflik antara suku yang berkaitan dengan permasalahan agama. Kelompok ini berpegang pada buku panduan hidup **Ahluzimi**, dan bila merasa kalah dengan kelompok lain akan pindah dari wilayah tersebut. Pada umumnya, dulu mereka tidak mau bekerja di sektor pemerintahan karena ada anggapan pemerintah adalah identik dengan Belanda yang kebanyakan beragama Kristen. Orang Tidung pertama kali bekerja di sektor pemerintahan pada tahun 1964

2.3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang ada di masyarakat perbatasan saat ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah penduduk perbatasan Kalimantan Timur, khusus masyarakat di Kabupaten Bulungan yang memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat Kalimantan Timur dengan masyarakat Malaysia. Hal ini sangat berkaitan dengan proses mobilitas yang terjadi di masyarakat, serta akses yang ada di wilayah tersebut. Bagian ini menggambarkan kondisi sosial dilihat menurut hubungan sosial,

akses terhadap sarana/prasarana sosial, dan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat perbatasan.

- **Hubungan Sosial Masyarakat Perbatasan**

Hubungan sosial yang terjadi di masyarakat perbatasan Kalimantan Timur, baik hubungan internal dan eksternal,³ dapat dikelompokkan kedalam dua pola. **Pola pertama**, hubungan yang didasari sejak masa nenek moyang; **Pola Kedua**, didasari adanya mobilitas penduduk dari dan ke luar tempat tinggalnya.

Pola pertama dapat dilihat dari dua kasus perjalanan sejarah masyarakat suku asli Kalimantan Timur, yaitu Sukubangsa Dayak Kayan dan Sukubangsa Tidung, yang sampai saat ini masih dijumpai baik di wilayah Kalimantan bagian Indonesia maupun Malaysia. Sukubangsa Dayak Kayan mempunyai pola hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga muncul kelompok-kelompok Kayan baru. Di antara kelompok ada rasa keterikatan karena merasa satu kerabat atau dalam kepemilikan tanah yang sama. Kondisi ini berdampak terhadap hubungan sosial baik dengan kelompok Dayak Kayan di wilayah Indonesia maupun di Malaysia. Khusus masyarakat Kayan yang ada di perbatasan, masih terjadi saling mengunjungi baik untuk keperluan adat, pekerjaan, dan perdagangan. Kelompok ini umumnya berdiam di wilayah darat, maka dalam penentuan batas tanah digunakan '*jarak jelajah*' yang diketahui oleh tetangga, karena pada waktu pengukuran diikuti orang lain sebagai saksi.

Sukubangsa Tidung, pada dasarnya mempunyai wilayah sebaran yang cukup luas, baik di Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia, orang Tidung terutama tersebar di wilayah Bulungan bagian timur serta pulau sekitar seperti Tarakan, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik. Di luar Indonesia, adalah dari Tanjung Mangkaliat sampai Kudat, Brunai dan Filipina. Menurut penuturan pencerita, asal mula orang

³ Hubungan internal adalah hubungan yang terjadi di antara penduduk setempat, sedang hubungan eksternal dengan masyarakat luar khususnya dengan masyarakat Malaysia.

Tidung dari Tawau (Negara Bagian Sabah), yang kemudian bermobilitas ke Sinubatang (tahun 1300) dan Tarakan (tahun 1326). Orang Tidung yang sebagian besar adalah 'orang pantai', pada umumnya mengenal batas wilayah laut yang disebut 'kelong'. Misalnya batas dengan Negara Malaysia dibuat dengan *kelong-kelong* sepanjang 500 meter, dan batas ini berlaku tetap serta diakui oleh pihak Malaysia.

Gerakan mobilitas ini berdampak terhadap pola hubungan yang ada sampai saat ini, karena mereka merasa berasal dari satu keturunan yang sama, hubungan perkawinan, dan keterikatan terhadap tanah ulayat keluarga. Dampak dari hubungan ini memungkinkan adanya kemudahan dalam berkunjung baik dari atau ke Malaysia. Berdasarkan perjalanan sejarah orang Tidung tersebut, paling tidak ada tiga pola hubungan yang terjadi saat ini antara orang Tidung Indonesia dan Malaysia, yaitu:

1. **Perkawinan**, biasanya terjadi antara laki-laki Malaysia dengan perempuan dari pihak Indonesia;
2. **Perdagangan**, dari pihak Indonesia menjual hasil-hasil hutan dan dari Malaysia membawa pulang kebutuhan pokok seperti beras, sabun, gula dan sebagainya;
3. **Ulayat Tanah**, karena di antara penduduk Kalimantan Timur ada yang masih memiliki tanah ulayat di wilayah Malaysia, begitupula sebaliknya. Penduduk bisa mengolah tanah dengan sekehendaknya, namun tidak boleh dijual.

Pola kedua, merupakan kasus-kasus yang baru terjadi, dan lebih disebabkan karena adanya mobilitas penduduk dari wilayah Indonesia di luar Propinsi Kalimantan Timur. Ada dua kelompok suku bangsa yang dominan dalam gerakan ini, yaitu Sukubangsa Bugis dan suku-suku dari NTT. Orang Bugis datang lebih dulu dari orang NTT dengan menggunakan kapal layar sebagai nelayan, pedagang, bahkan ada yang sebagai 'bajak laut'. Mereka menemui daerah baru, yaitu di wilayah Negara Bagian Sabah dan wilayah pulau-pulau bagian timur Kalimantan seperti Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Sementara itu, kelompok NTT diperkirakan baru mulai ada di Pulau Nunukan sesudah tahun 1940, yang akhirnya bekerja di Tawau.

Khusus di wilayah Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, orang Tidung yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli di daerah tersebut tergeser dengan

kedatangan para pendatang ini. Kondisi ini terlihat dengan makin menyempitnya wilayah yang dikuasai, baik dari segi lahan maupun aktifitas sosial yang ada. Kelompok pendatang, yaitu orang Bugis, merasa pulau yang dimasuki tidak berpenghuni sehingga dengan mudah tanah yang ada di pulau tersebut dikapling-kapling sesuai yang dikehendaki, yang kepemilikannya berlaku sampai saat ini. Pergeseran-pergeseran penduduk Tidung pun terjadi, yang tampaknya tidak menunjukkan adanya konflik sosial yang berarti, kecuali makin terpojoknya orang Tidung pada lokasi yang kurang akses pembangunannya.

Hubungan sosial antara kelompok Tidung dan pendatang berjalan dengan baik, namun dilihat dari tempat tinggal kelompok tersebut mengelompok pada wilayah-wilayah tertentu. Di Pulau Sebatik, misalnya, tempat tinggal orang Tidung adalah di Desa Setabu yang masih sulit dijangkau karena keterbatasan sarana/prasarana transportasi jalan, kecuali melalui laut. Penduduk pendatang banyak tinggal di Sungai Nyamuk dan Sungai Pancang, yang juga merupakan pusat dari aktifitas ekonomi Kecamatan Sebatik.

Berbeda dalam hubungan sosial yang terjadi di antara para pendatang, walaupun terjadi pembauran dalam berbagai faktor, namun fokus kelompok masih nyata terlihat. Pendatang yang sukses di perantauan Malaysia (Tawau) akan memberi informasi pada keluarga di kampung, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Bermula dari sifat hubungan pekerjaan ini, berdampak terhadap berbagai kondisi sosial yang ada di masyarakat pendatang, baik yang ada di wilayah Indonesia maupun Malaysia. Dari kasus-kasus yang muncul di antara masyarakat pendatang maupun penduduk lokal, dapat dilihat pola hubungan sosial yang terjadi di masyarakat perbatasan Kalimantan Timur, yaitu:

1. **Perkawinan.** Terjadi hubungan perkawinan antara pendatang dengan pendatang, pendatang dengan orang lokal (Suku Tidung dan Suku Dayak), orang Indonesia dengan orang Malaysia.
2. **Pekerjaan.** Adanya proses mencari kerja pada masyarakat pendatang merupakan awal terjadinya hubungan sosial antara penduduk perbatasan Kalimantan Timur

dengan pendatang maupun orang Malaysia. Kondisi ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Positif, karena dengan hubungan yang terjadi antara pendatang dan penduduk setempat memudahkan pendatang memperoleh pekerjaan di Malaysia atau di wilayah perbatasan. Namun hal yang negatif, hubungan ini sering menjurus pada pelanggaran hukum karena banyak terjadi kemudahan-kemudahan yang bersifat 'semu'. Hubungan yang terjadi dalam mencari pekerjaan, tidak peduli apakah legal atau ilegal.

3. **Perdagangan.** Hubungan ini terutama terjadi antara orang Bugis yang bertempat tinggal di Sebatik atau Nunukan, atau orang Dayak yang tinggal di sepanjang perbatasan bagian darat. Saling ketergantungan di antara komunitas-komunitas tersebut membuat hubungan tersebut terus berlanjut sampai saat ini. Bahkan hubungan perdagangan ini terjadi sampai ke Negara Brunai, yang berasal dari kebutuhan masyarakat Brunai akan hasil bumi yang dihasilkan masyarakat Dayak di wilayah perbatasan Krayan.

- **Akses Sarana/Prasarana Sosial**

Sarana/prasarana sosial yang mencapai penduduk di wilayah perbatasan sangat terbatas. Pada umumnya hanya terbatas pada sarana/prasarana sangat mendasar, misalnya sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi, dan sarana sosial lainnya. Keterbatasan ini merupakan dampak dari pembangunan yang ada, karena lebih berfokus kepada daerah yang diperkirakan 'berhasil' secara ekonomi. Contohnya wilayah perbatasan di Kecamatan Nunukan bagian kepulauan. Luas wilayahnya sangat kecil, namun sarana/prasarana sosial yang ada dapat dikatakan lengkap dibanding wilayah perbatasan lain. Di pulau ini terdapat akses komunikasi telpon, landasan pesawat yang dapat mendaratkan pesawat lebih besar dari *cessna*; akses pelayanan pencari kerja ke luar negeri, yaitu Malaysia; akses pengurusan dokumen untuk bekerja di Malaysia dengan beberapa perwakilan yang terkait dengan persoalan migrasi.

Pada umumnya perkembangan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur sangat lamban dibanding dengan daerah lain di Propinsi Kalimantan Timur. Akses perhubungan antar daerah masih sangat terbatas, baik perhubungan darat, udara, maupun sungai. Sarana jalan belum ada, sehingga hubungan antara daerah, terutama dari kota propinsi maupun kabupaten hanya dapat dicapai melalui udara. Misalnya Kota Kecamatan Krayan, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Long Pahangai dan Long Apari tidak dapat dicapai baik melalui sungai maupun darat dari kota-kota pantai bagian timur. Namun sarana dan prasarana perhubungan udara di kawasan ini pun sangat terbatas, yang hanya dapat dilandasi sejenis pesawat helikopter dan *cessna*. Lapangan udara yang dapat dilalui oleh pesawat udara yang relatif lebih besar terbatas pada hubungan antar kota kabupaten, atau daerah yang dianggap berpotensi secara ekonomi seperti Kota Balikpapan, Samarinda, Tarakan, dan Tanjung Selor.

Seperti umumnya wilayah Kalimantan, sungai mempunyai peran penting sebagai sarana transportasi namun masih terbatas pada angkutan kapal bermuatan kurang dari 2,5 ton. Ada lima sungai yang bisa menghubungkan wilayah perbatasan dengan wilayah di luar kawasan tersebut, yaitu Sungai Mahakam menghubungkan Samarinda dengan Long Pahangai, Sungai Kayan menghubungkan Tanjung Selor dengan Long Nawang, Sungai Pujungan menghubungkan Tanjung Selor dengan Long Pujungan, Sungai Sesayap menghubungkan Tarakan dengan Mentarang, dan Sungai Sebuku menghubungkan Kecamatan Nunukan pulau dengan wilayah Kecamatan Nunukan daratan yang ada di kawasan Sebuku. Namun pada beberapa bagian sungai-sungai itu, misalnya Sungai Kayan ada yang tidak dapat dilalui; Sungai Sebuku ada waktu-waktu tertentu aliran sungai sangat berbahaya dengan gelombang pasang air laut yang disebut masyarakat setempat dengan '*dulun*'.

Sarana/prasarana jalan darat yang bisa mencapai wilayah perbatasan terbatas dari Tanjung Selor ke Long Bawang dan Lumbis. Jalan ini, walaupun masih merupakan jalan tanah yang dikeraskan namun bila dilanjutkan akan sampai di wilayah perbatasan Malaysia. Pada saat ini pemerintah sedang membangun beberapa sarana jalan darat yang dapat menghubungkan beberapa wilayah perbatasan Kalimantan

Timur lain dan luar propinsi. Rencana terbesar adalah trans Kalimantan yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Selatan - Tengah - Timur – Barat, yang direncanakan sampai di sepanjang wilayah perbatasan Kalimantan.

Akses transportasi lain adalah melalui laut. Kapal laut yang tersedia tidak hanya untuk kapal barang, namun juga empat buah kapal penumpang yang bermuatan besar, yaitu **Kapal Tidar** (daerah-daerah Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan-Jawa Timur), **Kapal Leuser** (daerah-daerah Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan-Jawa Timur-Jawa Tengah), **Kapal Awu** (Kota Nunukan-Sulawesi Selatan-NTT), dan **Kapal Binaiya** (daerah-daerah Kalimantan Timur-Sulawesi Selatan-Jawa Timur-Jawa Tengah). Dilihat dari jalur kapal-kapal tersebut, menunjukkan arus mobilitas penumpang yang dari dan ke Kalimantan Timur masih didominasi Kawasan Timur Indonesia, yaitu umumnya para pencari kerja di daerah Kalimantan Timur dan sekitarnya atau Malaysia.

Keberadaan kapal-kapal besar ini di Pulau Nunukan lebih kepada jasa transportasi lalu lintas manusia, yakni kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Sabah. Pelabuhan Nunukan, meskipun masuk kategori orde tiga namun sangat berperan dalam melayani jasa transportasi ke daerah pedalaman, antar pulau kecil, antar propinsi, bahkan antar negara, ke Sabah dan Philipina. Di samping tiga pelabuhan laut yang ada di Pulau Nunukan, yaitu pelabuhan baru, pelabuhan lama, dan pelabuhan Beringin, terdapat landasan pesawat terbang yang dapat didarati pesawat Cassa 212. Landasan ini telah ada sejak zaman Jepang, dan pada saat ini melayani tiga penerbangan selama satu minggu dengan rute Tarakan – Nunukan.

Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur masih terbatas, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Kondisi fasilitas pendidikan masih belum memadai baik dilihat dari kebutuhan dasar belajar maupun tenaga pendidik profesional yang sesuai dengan tingkat pengajaran dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan sebatas pada tingkat sekolah dasar, sehingga akses ke pendidikan di atas sekolah dasar sangat jauh.

Tabel 2.5. menunjukkan sarana dan prasarana pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur dan daerah tingkat II di wilayah perbatasan.

Tabel 2.5: Sarana dan Prasarana Pendidikan di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, Kabupaten Bulungan

Propinsi/Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rata-Rata Tiap Sekolah		Rasio Murid Terhadap Guru
				Murid	Guru	
Kalimantan Timur:						
SD	1.993	331.638	15.900	404	19	21.47
SLTP	341	93.791	6.161	560	37	14.75
SLTA	113	33.197	2.783	649	51	12.04
Sekolah Kejuruan:						
SLTP	3	304	131	101	44	2.32
SLTA	52	25.743	1.066	495	21	24.15
Kabupaten Kutai:						
SD	728	101.919	5.600	283	16	36.13
SLTP	115	19.960	1.718	349	30	10.79
SLTA	27	5.631	518	396	38	10.02
Sekolah Kejuruan:						
SLTA	5	1.793	134	359	27	13.38
Kabupaten Pasir:						
SD	321	38.904	1564	391	18	45.90
SLTP	32	8.017	463	440	29	15.19
SLTA	9	1.977	156	548	38	13.53
Sekolah Kejuruan:						
SLTA	3	1.066	60	355	20	17.77
Kabupaten Bulungan:						
SD	298	34.101	1778	342	17	39.35
SLTP	32	6.547	439	349	27	13.16
SLTA	10	2.262	208	503	43	11.27
Sekolah Kejuruan:						
SLTA	1	428	26	428	25	16.46

Sumber: Kalimantan Timur dalam angka 1995, diolah oleh PPT-LIPI, 1998

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana untuk sekolah kejuruan, khusus tingkat SLTP, masih minim yang hanya ada di Kotamadya Balikpapan dan Samarinda. Untuk tiga kabupaten wilayah perbatasan hanya ada pendidikan kejuruan setingkat SLTA. Kondisi ini memperlihatkan rendahnya akses yang memungkinkan bagi penduduk yang ingin melanjutkan pendidikan di atas sekolah dasar, terutama di Kabupaten Pasir dan Bulungan. Perbandingan antara sarana/prasarana sekolah dasar dan SLTP, bahkan SLTA sangat jauh, sehingga memungkinkan tingkat murid yang

dropout sampai tingkat sekolah dasar pun tinggi. Dilihat dari perbandingan jumlah murid dan sarana pendidikan setingkat SLTA yang tersedia di tiga kabupaten tersebut, tampaknya pendidikan kejuruan cukup diminati. Contoh di Kabupaten Bulungan hanya ada satu sekolah kejuruan namun jumlah murid ada 428 orang, sedangkan tingkat SLTA untuk 10 sekolah menampung 2.262 murid atau 1 sekolah rata-rata ada 226 murid.

Khusus untuk Kecamatan Sebatik, sekolah dasar negeri (SDN) ada di setiap desa atau dusun yang berjumlah 14 buah ditambah satu SD persiapan. Tingkat SLTP ada dua, yaitu SLTP Negeri dan SLTP Swasta, sedang SLTA hanya satu di Sei Nyamuk yang juga milik swasta. Pada umumnya anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA lebih memilih di Tarakan dan Nunukan, namun kesempatan tersebut masih sangat terbatas yang harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi orangtua, karena selain biaya pendidikan, orangtua harus menyediakan biaya akomodasi yang cukup tinggi. Di samping sekolah-sekolah umum di atas, ada juga sekolah madrasah untuk tingkat Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Alawiyah.

Selain sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan pun dianggap sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya peningkatan jaringan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes dan kegiatan masyarakat Posyandu. Menurut data dinas kesehatan tahun 1995, jumlah rumah sakit di Propinsi Kalimantan Timur ada 23 buah yang tersebar di enam daerah tingkat II. Untuk tingkat kecamatan belum ada fasilitas rumah sakit, kecuali Puskesmas yang ditingkatkan dengan prasarana 'rawat inap'. Misalnya, di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, namun kondisi fasilitas yang ada masih rendah sehingga penduduk banyak yang berobat di Tawau. Rumah sakit tidak hanya milik pemerintah yang biasanya ada di kota kabupaten, namun juga rumah sakit milik ABRI, BUMN, dan perusahaan-perusahaan yang tersebar di Kalimantan Timur di mana perusahaan terpusat. Misalnya di Kabupaten Kutai terdapat rumah sakit milik Pertamina.

Pelayanan kesehatan untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dan terisolir dilakukan melalui program 'dokter terbang' atau 'dokter terapung'. Kegiatan ini termasuk untuk daerah-daerah yang ada di wilayah perbatasan. Namun tampaknya upaya ini masih sulit dilaksanakan, sehingga penduduk perbatasan banyak yang mengambil inisiatif berobat ke wilayah Malaysia, yaitu rumah sakit - rumah sakit perusahaan/perkebunan atau kampung di Malaysia yang dilihat dari sudut fasilitas lebih baik. Begitupula dari sisi biaya dan transportasi yang tidak besar dibandingkan bila pergi ke rumah sakit yang ada di pusat-pusat kota di wilayah Indonesia. Misalnya, penduduk Pulau Sebatik lebih suka berobat ke Tawau, atau penduduk Desa Panado (Krayan) ke Desa Bakelalan (Sarawak).

Sarana/prasarana sosial lain yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur adalah sarana agama dan ekonomi. Sarana agama terbatas dengan agama yang dianut penduduk setempat. Seperti di wilayah perbatasan Sebatik yang dominan penduduknya adalah Islam, sarana ibadah yang ada umumnya adalah Mesjid dan langgar. Namun di Pulau Sebatik, karena penduduknya lebih heterogen, maka sarana ibadah yang ada selain mesjid/langgar juga ada gereja.

- **Permasalahan Sosial**

Kondisi geografis wilayah perbatasan Kalimantan Timur yang berbeda antara wilayah daratan dan kepulauan menyebabkan permasalahan sosial yang muncul pun berbeda. Pada bagian ini akan dilihat permasalahan sosial yang banyak muncul akhir-akhir ini di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, yaitu permasalahan tanah dan kriminal. Kedua faktor ini bila tidak diantisipasi dapat berdampak terhadap kondisi sosial baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif dapat menjadi wadah integrasi penduduk, sebaliknya dengan pengaruh negatif menimbulkan disintegrasi. Tetapi, kecenderungannya lebih kepada pengaruh negatif, dengan munculnya berbagai macam konflik kepentingan.

Permasalahan tanah, pada umumnya banyak dijumpai di perbatasan wilayah daratan. Permasalahan yang muncul lebih terfokus kepada pemanfaatan sumberdaya alam atau hutan yang berdampak kepada kepemilikan lahan, karena banyak terjadi konflik-konflik antara penduduk asli yang merasa sebagai pemilik dengan pendatang atau pengusaha yang diberi hak dalam pengelolaan hutan. Penduduk asli mengenal penguasaan 'tanah ulayat' berdasarkan latar belakang penduduk, baik yang ada di wilayah Indonesia maupun Malaysia, sehingga pada dasarnya tidak mengenal adanya batas negara kecuali batas alam yang diketahui oleh sesama penduduk setempat. Sejauh tanah ulayat tersebut belum mempunyai nilai ekonomi tinggi belum muncul permasalahan serius, namun sebaliknya bila bernilai ekonomi tinggi diantisipasi kemungkinan terjadi konflik, baik dalam anggota kerabat maupun antar suku yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut.

Sistem kepemilikan ulayat tanah di daerah pedalaman Kalimantan Timur, yang sangat terkait dengan sistem keluarga luas yang ada di dalam masyarakat, berdampak pada munculnya desa-desa yang merupakan batas-batas tanah ulayat masyarakat. Batas-batas tanah ulayat biasanya berhubungan dengan sistem penggunaan ladang (*jakau*) yang ada di daerah itu. Sistem rotasi ladang menyebabkan adanya luasan areal tertentu, ditambah dengan hutan primer yang ada di sekitar ladang. Sistem desa formal yang ada saat ini tampaknya mengambil dari sistem tanah ulayat keluarga luas. Begitupula dengan pembagian kecamatan, masih terikat dengan sistem ulayat tradisional yang pernah diberlakukan sehingga dapat menjadi identitas suku maupun sub-suku yang ada di daerah tersebut. Konflik sosial karena permasalahan batas tanah ulayat yang dikaitkan dengan penggunaan tanah misalnya seperti yang terjadi baru-baru ini antara orang Lumbis (Suku Tegalan) dengan orang Mentarang (Suku Putuk), yang memang pada masa lalu merupakan musuh tetap dalam perang antar suku. Mengacu kepada sistem kepemilikan dengan semakin banyaknya usaha konsesi HPH yang banyak menggunakan lahan rakyat, maka untuk masa yang akan datang perlu diantisipasi permasalahan konflik yang mungkin terjadi. Apalagi kondisi hutan di wilayah Malaysia yang makin berkurang, sehingga seringkali terjadi pelanggaran

batas wilayah oleh pengusaha di wilayah Malaysia dalam upayanya untuk melakukan eksploitasi hasil hutan.

Berkaitan dengan sistem perladangan berpindah yang diterapkan oleh masyarakat asli, pemerintah daerah setempat tidak pernah menganggap *sistem perladangan berpindah* ini sebagai suatu sistem yang merusak. Kondisi ini berbeda dengan pendapat para pejabat dari pusat yang sering menyebut perladangan berpindah sebagai sistem yang merusak. Sistem perladangan berpindah ini tidak perlu dikhawatirkan, karena pada kenyataannya para peladang sangat mengetahui sistem pengolahan lahan yang dipakai dan tidak merusak lingkungan. Kondisi pandangan yang berbeda ini menyebabkan peraturan yang diterapkan dari pusat seringkali kontradiktif dengan situasi di lapangan, seperti penduduk dilarang menggunakan *chanishaw*, namun justru pihak HPH memberikan modal *chainshaw* kepada penduduk lokal. Selain dari itu, sistem perladangan berpindah pun dijadikan sebagai suatu dasar pertimbangan sistem *re-grouping* desa-desa di di wilayah perbatasan. Ide *re-grouping* yang mengumpulkan penduduk asli di suatu tempat yang jauh dari ladang tidak efisien bagi masyarakat peladang, karena lahan akan dibiarkan sehingga menjadi tandus. Tampaknya sistem *re-grouping* di wilayah pedesaan ini terlebih dahulu harus memperhitungkan aspek-aspek kebiasaan masyarakat tersebut.

Permasalahan tanah yang terjadi di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah bagian daratan. Di wilayah ini, terutama Pulau Sebatik, akhir-akhir ini muncul kasus pembelian tanah oleh pendatang (TKI) yang kembali dari Sabah. Keinginan untuk memiliki lahan di pulau ini cenderung meningkat, sebagai persiapan bila mereka di PHK dari perusahaan di Sabah serta kemudahan menjual hasil langsung di Tawau. Apalagi bagi kelompok yang sudah mempunyai hubungan dengan para tauke di Malaysia/Tawau.

Mengacu kepada permasalahan tanah yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi sosial di wilayah tersebut. **Dampak positif** dari permasalahan tanah di wilayah daratan adalah munculnya integrasi antara penduduk asli dengan pendatang yang

umumnya pekerja perusahaan. Bila hubungan yang ada bersifat *win-win* antara pendatang dan penduduk asli, bisa menjadikan kekuatan bagi pembangunan wilayah, atau akses penggunaan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya akses pelayanan kesehatan, transportasi, ekonomi, dan mungkin pendidikan. Sedangkan pada wilayah kepulauan, mungkin saja daerah ini dapat dijadikan salah satu tempat untuk menghambat 'pendatang haram' yang akan ke Tawau karena adanya lapangan kerja baru dalam mengelola tanah-tanah yang umumnya akan dijadikan perkebunan coklat, namun dengan ta'oge orang Indonesia sendiri.

Dampak negatif perlu diantisipasi, bila tidak terjadi hubungan yang bersifat *win-win* antara penduduk asli dan pendatang. Seperti di wilayah daratan, dengan banyaknya bermunculan perusahaan yang kurang memperhatikan keberadaan penduduk asli dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga tidak terjadi hubungan harmonis di wilayah perbatasan. Di samping itu, pengkaplingan tanah sebagai HPH secara besar-besaran dapat mengakibatkan mata pencaharian penduduk asli yang umumnya masih melakukan usaha dengan 'sistem ladang berpindah' dan berburu di hutan terhenti. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa frustrasi yang secara tidak langsung mengganggu kegiatan pendatang sekedar berusaha memperoleh kebutuhan pokok. Di samping itu, terkadang pendatang yang 'nakal' mengajar penduduk asli mengambil kayu untuk dibeli dengan harga murah.

Untuk wilayah kepulauan, bila sistem penjualan tanah atau pergantian kepemilikan tanah tidak diatur dengan semestinya, akan banyak pendatang baru dari Sabah yang menguasai tanah di pulau tersebut. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya pengulangan peristiwa lalu, yaitu penduduk baru 'menggusur' penduduk lama seperti tergusurnya orang Tidung oleh orang Bugis. Di samping itu, bisa saja muncul kepemilikan yang tumpang tindih serta penjualan bawah tangan, atau penjualan tanah warisan karena tergiur dengan nilai 'ringgit'. Semua ini bila tidak diantisipasi dapat menjadikan satu permasalahan sosial di antara masalah-masalah lain yang ada di perbatasan.

Kriminalitas, merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi karena kondisi sosial yang tidak seimbang di masyarakat. Untuk wilayah perbatasan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, juga timbul berbagai permasalahan kriminal, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Daerah-daerah kosong, yang umumnya ada di perbatasan wilayah daratan merupakan daerah rawan karena keterbatasan aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di daerah tersebut. Permasalahan yang muncul di daerah-daerah tersebut lebih menjurus kepada pencurian sumberdaya alam seperti kayu dan sarang burung walet. Pencurian kayu yang umumnya dilakukan oleh oknum orang Indonesia, namun hasil dari pencurian tersebut ditampung dan diselundupkan ke wilayah Malaysia. Kegiatan ini terbukti dengan adanya penangkapan serta ditemukannya alat-alat besar seperti traktor yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Akibat adanya aktifitas pencurian kayu, Indonesia tidak saja dirugikan dari kayu-kayu yang diambil namun juga di beberapa tempat terjadinya pergeseran batas negara antara Indonesia dan Malaysia yang merugikan pihak Indonesia. Menurut informasi yang diperoleh, pergeseran batas ini telah masuk ke wilayah Indonesia sampai 7 Km dari titik batas semula. Apabila sepanjang wilayah perbatasan Pulau Kalimantan terjadi pergeseran batas, dapat diperkirakan berapa besar kerugian Indonesia sebagai akibat tindakan yang dapat dikategorikan kriminal tersebut.

Di samping aktifitas kegiatan di atas, di wilayah kepulauan juga ditemukan tindakan kriminal yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Aktifitas ini muncul akibat dari perkembangan daerah ini sebagai daerah transit untuk masyarakat yang akan bekerja di Malaysia, di samping kegiatan yang telah dilakukan penduduk sejak dulu, misalnya penyelundupan barang dan jasa/orang ke wilayah Malaysia. Di satu sisi kegiatan ini melanggar hukum tetapi di sisi lain adanya kegiatan ini juga memberi keuntungan bagi penduduk. Banyak diantara para pelaku pelanggaran ini dapat membangun usahanya dengan keuntungan yang didapat dari kegiatannya tersebut.

Kegiatan penyelundupan ini masih juga berlanjut pada akhir-akhir ini, terutama dengan adanya krisis ekonomi/*krismon* yang melanda Indonesia maupun

Malaysia. Aktifitas ini termasuk kegiatan yang cukup dihebohkan, karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat paling mendasar, yaitu penyelundupan barang kebutuhan sembilan bahan pokok seperti beras ke Malaysia. Menurut informasi, kegiatan ini tidak dilakukan oleh orang Nunukan atau Sebatik tapi langsung dari Tarakan.

Tindakan kriminalitas lain, seperti yang terjadi di Nunukan masih bersifat 'tradisional', berkaitan dengan pencurian dan perkelahian karena permasalahan kecil seperti perempuan, judi, dan pengaruh minuman keras. Perkelahian banyak terjadi antara pendatang, khusus pendatang asal NTT dan Sulawesi Selatan. Perjudian dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti saat-saat menunggu keberangkatan ke Malaysia dalam pengurusan dokumen, yang bersifat tradisional seperti 'gaplek' dan adu ayam. Perkelahian ini umumnya dapat diselesaikan secara baik berkat bantuan tokoh masyarakat dari kelompok yang terlibat dalam perkelahian.

Kondisi sosial yang ada saat ini juga berpengaruh terhadap pemuda setempat yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan yang mendorong ke arah negatif. Sejak kecil anak-anak terbiasa bekerja mengikuti orang dewasa di lingkungannya sehingga berdampak terhadap perkembangan jiwa anak. Pemandangan anak-anak menjual *valas* (valuta asing) adalah hal biasa, sehingga untuk kelompok ini banyak dijumpai anak-anak 'minum' serta 'ngobat'. Obat-obat yang dikenal dengan sebutan *Maradno* atau *Mado* diperoleh melalui Malaysia, *dadah* (narkotika) masuk melalui Filipina dengan jalur Filipina – Tawao – Nunukan (Raharto dkk., 1998:130). Kasus ini memang belum banyak dijumpai dan belum sampai pada taraf mengkhawatirkan, namun mengingat perkembangan Nunukan dan Sebatik yang makin ramai, perlu dipertimbangkan kemungkinan hal-hal terburuk yang dampak berdampak terhadap kondisi sosial di masyarakat kepulauan.

Di samping dua permasalahan sosial di atas, masih banyak permasalahan sosial lain yang mungkin berdampak terhadap kondisi sosial di wilayah perbatasan tersebut. Misalnya, permasalahan kesehatan berkaitan dengan PMS (Penyakit Menular Seksual) sebagai akibat berkembangnya pusat-pusat hiburan seperti karaoke dan diskotik, dan gejala stress akibat penyiksaan yang dialami TKI di penjara di Malaysia (Tawau),

serta masalah 'deportasi' melalui Nunukan yang tidak tertampung oleh sarana/prasarana yang ada di pulau tersebut. Kesemua ini dapat dikatakan sebagai dampak adanya kegiatan mobilitas penduduk yang berkepanjangan dari berbagai propinsi yang membawa nilai-nilai daerahnya sendiri, sehingga sifat keheterogenan sosial budaya tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada terjadinya kondisi sosial yang kondusif atau kendala bagi kehidupan masyarakat.

2.4. Kondisi Ekonomi

Propinsi Kalimantan Timur dikenal mempunyai potensi kehutanan dan migas yang besar, namun pengelolaannya bersifat ekstraktif, dan kurang dapat mendukung perekonomian lokal maupun perekonomian rakyat. Ciri ekonomi seperti ini adalah tingginya kontribusi industri terhadap penerimaan negara dan daerah, namun kurang mampu mendorong kemampuan ekonomi rakyat, sehingga kantong-kantong kemiskinan biasanya berada di wilayah pedalaman yang kurang terimbas oleh akselerasi industri.

Bila dilihat dari sarana ekonomi yang ada di wilayah perbatasan, masih sangat terbatas, terutama di desa-desa perbatasan darat bagian pedalaman Pulau Kalimantan. Pasar umumnya hanya ada di kota kecamatan, mungkin karena belum merupakan kebutuhan serta populasi penduduk yang masih rendah. Kondisi ini juga terlihat di Pulau Sebatik, di mana pasar yang cukup lengkap hanya ada di Desa Sungai Nyamuk, sedang di wilayah lain hanya sebagai pasar mingguan atau pasar 'kaget' menjual kebutuhan umum atau kebutuhan dasar penduduk. Kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari warung-warung yang ada di desa-desa, atau belanja ke Tawau. Di wilayah perbatasan, akses pasar yang paling memungkinkan dan lengkap adalah di Pulau Nunukan. Ada dua pasar besar sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari maupun pusat transaksi ekonomi legal atau ilegal.

Di samping sarana/prasarana ekonomi di atas, di Kecamatan di Sebatik ada tempat pelelangan ikan (TPI) namun tidak berfungsi. Penduduk atau nelayan lebih

suka menjual langsung kepada tauke di Tawau atau juragan ikan. Sarana ekonomi seperti Bank hanya ada di Pulau Nunukan, sedang di Sebatik belum ada dan masih dalam rencana. Penduduk Sebatik yang ingin menyimpan uang di Bank lebih memilih pada Bank-Bank di Tarakan karena transportasi lebih mudah. Bahkan para pengusaha yang mempunyai hubungan dengan tauke Tawau ada yang menyimpan uang di Bank Tawau.

Walaupun kondisi sarana/prasarana ekonomi yang ada sangat terbatas, khusus untuk wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, merupakan daerah yang cukup strategis bagi kegiatan ekonomi yang bersifat internasional. Kondisi ini sangat didukung dengan perkembangan Tawau sebagai pelabuhan ekspor – import yang cukup besar di Negara Bagian Sabah – Malaysia. Perubahan yang terjadi di Tawau secara cepat berimbas pada kondisi ekonomi di dua pulau tersebut. Misalnya, terjadinya krisis ekonomi di Malaysia secara cepat berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik dibanding dengan krisis yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena ketergantungan ekonomi penduduk perbatasan pada negara tetangga. Kondisi perekonomian tersebut, menjadikan masyarakat sensitif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di negara tetangga.

Ketergantungan masyarakat perbatasan keperluan terhadap Tawau – Malaysia yang bermula dengan hubungan perekonomian berkembang ke arah hubungan yang bersifat *patront – client*, karena banyak kegiatan masyarakat di wilayah Indonesia yang kehidupannya tergantung pada para tauke Tawau. Ini tidak terjadi pada pada usaha-usaha yang dilakukan penduduk di wilayah Indonesia seperti usaha perikanan dan perkebunan, tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Para nelayan diberi modal perahu serta perlengkapan penangkapan ikan lain, seperti mesin kapal, jaring, *cold box*, bahkan es pun diperoleh dari tauke di Tawau. Tetapi, ikan yang ditangkap baik jenis, ukuran dan harga ditentukan para tauke tersebut.

Kondisi tersebut di atas juga terjadi pada kegiatan usaha di bidang perkebunan, yaitu coklat. Para pengusaha, penduduk, atau juragan ada yang sudah mempunyai

hubungan langsung dengan para tauke di Tawau. Sifat ketergantungan ini pun tidak jauh berbeda dengan kasus di perikanan, yaitu tidak hanya merupakan hubungan pedagang dan penjual. Gambaran yang nyata memperlihatkan sifat *patron – client* yang kuat, karena tidak hanya kebutuhan modal namun dalam kesusahan seperti keperluan biaya perawatan sakit, tauke juga akan membantu. Bahkan para tauke dengan suka rela akan membantu memberi pinjaman uang dengan cepat tanpa jaminan materi, kecuali ‘rasa’ terikat yang tidak terucap menunjukkan kekuatan ‘batin’ yang sangat kuat dengan tauke tersebut.

Kondisi ekonomi di atas sangat berpengaruh terhadap harga jual hasil produksi pertanian (termasuk perikanan) yang selalu ditentukan oleh para tauke. Para nelayan tidak mempunyai posisi tawar dalam menentukan harga, maupun kemampuan untuk mengekspor ekspor secara langsung. Begitupula dalam berhubungan dengan negara-negara pengimport yang selalu melalui Tawau, karena jaringan-jaringan tersebut masih sulit ditembus tanpa bantuan para tauke Tawau. Ini juga disebabkan karena di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik sendiri belum ada perusahaan bergerak dalam bidang ekspor – import dari hasil-hasil produksi yang ada di wilayah perbatasan, terutama di wilayah kepulauan.

BAB III

PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN

Sebagai langkah awal dalam mengantisipasi perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah mengeluarkan peraturan daerah mengenai tata ruang daerah perbatasan, yaitu Perda No. 25/1995. Keputusan ini dapat dianggap sebagai suatu awal mula perencanaan tata ruang wilayah perbatasan yang dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Tahun 1995/1996 untuk daerah Kecamatan Krayan dan Kecamatan Pujungan;
2. Tahun 1996/1997 sedang dibuat untuk daerah Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir.

Sementara itu, rencana umum tata ruang ibukota kecamatan juga telah dibuat, yang meliputi daerah Kecamatan Peso, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Bunyu.

Dari rencana pembangunan di atas terlihat bahwa pemerintah masih lebih mengacu kepada pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan bangunan gedung. Pembangunan yang bersifat manusiawi seperti penciptaan lapangan pekerjaan

dan promosi kehidupan yang lebih baik tampaknya belum banyak muncul, terutama di daerah penelitian ini. Dalam kondisi masyarakat perbatasan dengan berbagai permasalahan yang muncul, serta didukung tingginya tingkat mobilitas penduduk masuk maupun keluar, pemikiran mengenai pembangunan non fisik perlu perhatian khusus. Tulisan ini mencoba melihat dan menggambarkan pembangunan yang ada di wilayah perbatasan, khususnya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Bulungan. Ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian sesuai dengan permasalahan kondisi masyarakat saat ini, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan bidang Pertahanan Keamanan (HANKAM), yang masing-masing dilihat menurut wilayah darat dan kepulauan.

3.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai usaha peningkatan ekonomi agar masyarakat pendukungnya mempunyai tingkat kehidupan yang lebih baik. Usaha ini antara lain dapat dalam bentuk peningkatan aktifitas yang berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta pembangunan sarana/prasana yang bersifat alat pendukung kegiatan ekonomi. Untuk wilayah perbatasan Kalimantan Timur, dengan mengacu kepada kondisi ekonomi yang ada saat ini, pembangunan ekonomi lebih berfokus di wilayah kepulauan. Situasi ini mungkin didukung oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk di wilayah tersebut.

Wilayah Daratan

Kondisi geografi daratan Kalimantan Timur mendukung pembangunan ekonomi ke pengembangan sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut. Salah satu usaha yang dapat dikembangkan adalah pengolahan hasil hutan seperti kayu, rotan, dan damar. Komoditi kayu dianggap paling potensial di hutan-hutan Kalimantan, khusus di wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi yang ada tampaknya

cenderung ke arah industri kehutanan dan perkebunan. Khusus untuk wilayah daratan Kabupaten Bulungan, daerah yang dianggap potensial untuk pengembangan kelapa sawit adalah Sebuku dan Semanggaris. Pada saat ini di daerah Sebuku telah dibangun perkebunan kelapa sawit yang disertai masuknya transmigrasi. Tahun 1996 sudah berjalan satu unit pemukiman (UPT Sebuku I), dengan masyarakat pendatang maupun lokal (APPDT) bersasal dari Suku Dayak Tegalan. UPT II direncanakan akan menerima APPDT dari Pulau Nunukan.

Perusahaan kayu yang pertama masuk di wilayah perbatasan ini adalah Yamaker (anak perusahaan HANKAM) dengan alasan menjaga keamanan di perbatasan. Perkembangan selanjutnya, muncul beberapa perusahaan perkayuan lain, antara lain PT. Karyasa Kencana, PT. Adindo Hutani Lestari, dan PT. Karang Hijau Lestari. Alasan utama yang umum dikemukakan perusahaan tersebut, adalah hendak membangun usaha perkebunan seperti kelapa sawit dan pembangunan daerah transmigrasi, namun pada kenyataan lebih berorientasi untuk pengambilan kayu. Usaha ini memperlihatkan pengambilan yang terkadang terkesan di luar batas, karena tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang diakibatkan.

Menurut penduduk lokal yang ada di sekitar wilayah perusahaan-perusahaan kayu tersebut, keberadaan perusahaan tersebut seperti PT. Yamaker yang telah lama membuka usaha perkayuan di wilayah tersebut, tidak memberikan keuntungan apapun bagi penduduk lokal. Pembangunan perusahaan ini kurang memberi kesempatan bagi penduduk dalam usaha meningkatkan kondisi ekonomi, begitupula untuk pembangunan daerah perbatasan. Pekerjaan yang ada lebih didominasi oleh pendatang, sehingga situasi ini berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal yang masih tetap miskin. Bahkan, lahan tempat mereka mencari makan pun makin berkurang karena makin meluasnya wilayah HPH industri perkayuan tersebut. Sarana/prasarana yang ada di wilayah perusahaan tersebut juga tidak/kurang memberi akses bagi penduduk lokal, dan hanya tersedia bagi pendatang baik sebagai pegawai setempat, maupun para transmigran di tempat tersebut. Jalan yang ada hanya berfungsi untuk kepentingan kegiatan perusahaan, atau perkampungan transmigrasi yang

dianggap menjadi kewajiban perusahaan. Bahkan, sarana/prasarana sosial seperti sarana/prasarana kesehatan pun sulit untuk dimanfaatkan penduduk lokal yang bukan warga perkampungan transmigrasi.

Dampak lain dari keberadaan usaha kehutanan ini adalah makin banyak terjadi penebangan liar, karena komoditi ini mudah didapat dan harganya cukup tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh cukup besar pula. Kegiatan pengambilan kayu ilegal ini didukung permintaan yang tinggi dari Negara Malaysia, karena di wilayah perbatasan bagian Malaysia, komoditi hutan sudah makin berkurang, sedang kebutuhan kayu meningkat. Wilayah perbatasan bagian Malaysia telah lama berubah menjadi perkebunan karet atau kelapa sawit, sehingga penguasaan hutan dengan kontrol dari pemerintah negara bagian cukup kuat untuk menahan kerusakan lingkungan maupun meminimalkan kerugian masyarakat. Bahkan, di antara kegiatan pencurian kayu tersebut ada yang didanai pihak oknum Malaysia, namun dilakukan orang Indonesia.

Beberapa pihak dan masyarakat yang ada di lingkungan aktifitas usaha per kayu ini sering merasa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun daerah perbatasan ini masih kurang serius. Dalam membangun daerah perbatasan wilayah daratan, pemerintah tampaknya belum melakukan terobosan-terobosan yang lebih memperhatikan kebutuhan atau kepentingan penduduk setempat, terutama dalam peningkatan pendapatan. Misalnya, pembangunan perkebunan atau berbagai industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut sehingga dapat menahan para pekerja ilegal atau komoditi hutan ke Malaysia.

Dengan melihat potensi sumberdaya alam yang kaya di wilayah perbatasan ini, di samping usaha-usaha besar di atas, aktifitas ekonomi yang dapat dikembangkan misalnya perkebunan rakyat, pertanian, bahkan usaha peternakan burung walet. Bila perencanaan dibuat dengan baik, yang lebih mementingkan pembangunan daerah dan masyarakatnya, mungkin permasalahan konflik-konflik sosial yang bermula dari rasa cemburu pendatang dan penduduk lokal dapat diatasi. Usaha ini pun dapat menjaga pelestarian lingkungan dari para pengambil kayu ilegal yang umumnya dilakukan

karena desakan ekonomi serta tergiur oleh ringgit Malaysia. Sementara itu, juga dapat menahan arus tenaga kerja ke Malaysia, terutama yang ilegal, karena tersedianya pekerjaan yang sama di bidang perkebunan.

Wilayah Kepulauan

Pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan lebih bervariasi dibanding wilayah daratan. Hal ini didukung oleh kondisi geografi, kondisi sosial, maupun akses yang lebih mudah dalam melakukan aktifitas perekonomian baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ada empat sektor yang dianggap dapat menunjang pembangunan ekonomi penduduk, yaitu perkebunan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Oleh sebab itu, pada umumnya pembangunan ekonomi yang ada lebih diarahkan pada keempat sektor tersebut, baik dalam sarana/prasarana maupun lapangan pekerjaan yang tersedia. Khusus untuk lapangan pekerjaan belum terbuka luas, karena umumnya usaha yang dilakukan masih bersifat industri rumah tangga seperti pengeringan udang dan ikan, atau perkebunan rakyat yang dikelola secara kekeluargaan.

Di antara dua pulau yang ada di perbatasan Kalimantan Timur, yaitu Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan, pada saat ini perkembangan ekonomi yang tampak menonjol lebih banyak di Pulau Nunukan. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena Pulau Nunukan merupakan daerah transito tenaga kerja yang akan ke Tawau - Sabah. Di samping itu, Kota Nunukan juga merupakan lokasi kantor-kantor pemerintahan dan kantor swasta khusus melayani tenaga kerja Indonesia yang akan ke negara tetangga tersebut.

Perkembangan perkebunan di Nunukan yang menjadi primadona adalah coklat, kemudian disusul dengan kopi, lada, cengkeh, dan kelapa. Empat komoditi terakhir, dalam perkembangannya tidak seperti coklat karena semua ini sangat ditentukan oleh kondisi pemasaran di Tawau. Pada saat ini, Tawau membutuhkan coklat, apalagi dengan adanya rencana untuk mengganti tanaman coklat yang ada di Sabah dengan

kelapa sawit. Kondisi ini merupakan peluang bagi petani di wilayah Indonesia untuk lebih mengembangkan usaha perkebunan coklat. Apalagi, dalam masa krisis moneter ini nilai rupiah turun sehingga petani coklat dapat menghasilkan harga jual yang tinggi bila dikonversi dengan rupiah.

Kegiatan ekonomi yang juga berkembang di Nunukan adalah bidang perdagangan. Kondisi geografis Pulau Nunukan mendukung terjadinya suatu jaringan perdagangan luar negeri (Tawau – Sabah dan Filipina), serta dalam negeri seperti daratan Pulau Kalimantan, Tarakan, dan Sulawesi Selatan. Pada saat ini, dengan berkembangnya jalur transportasi laut, hubungan perdagangan juga berlangsung dengan Surabaya. Komoditi perdagangan ke Tawau, selain hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan, adalah juga kayu. Khusus perdagangan kayu ini sekarang banyak yang bersifat perdagangan ilegal karena dari pihak Indonesia ada pelarangan untuk menjual kayu ke luar negeri, kecuali melalui prosedur yang ditentukan. Namun usaha ini masih berlanjut yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pada saat penelitian dilakukan (1998), diperoleh informasi bahwa ada rencana untuk pengembangan usaha peternakan sapi potong. Usaha ini direncanakan bekerjasama dengan pihak pengusaha dari Tawau, yaitu penggemukan sapi di Nunukan dengan bibit diperoleh dari luar. Bila peralatan untuk pengolahan baik, kemungkinan untuk pengolahan bisa dilakukan di kecamatan ini. Namun rencana ini bisa dilakukan sebagai tahap penggemukan saja, dan bila siap pakai dikembalikan ke Tawau. Permasalahannya, sampai saat ini masih ada larangan untuk import/eksport hewan hidup. Apabila usaha ini dapat diwujudkan, akan merupakan suatu terobosan baru bagi pengembangan ekonomi di Pulau Nunukan yang akan bisa menampung tenaga kerja baru.

Kondisi Pulau Sebatik dalam perkembangan ekonomi agak berbeda dengan Pulau Nunukan. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah Sebatik, awal tahun 1970 – tahun 1985, perekonomian di Sebatik masih didominasi oleh usaha-usaha pertanian yang berorientasi untuk kebutuhan keluarga, atau belum memperlihatkan bentuk perekonomian yang lebih komersial. Perkembangan mulai terlihat dengan adanya

rintisan usaha transportasi laut dan perdagangan antara Sebatik dan Tawau. Pada saat itu, usaha yang dilakukan bersifat subsisten dan semi komersial, seperti sayuran dan palawija untuk konsumsi Tawau dan Tarakan.

Pada awal tahun 1985 dimulai usaha penanaman coklat kecil-kecilan yang dilakukan migran Bugis yang mempunyai pengalaman bekerja di perkebunan di Malaysia, dengan bibit yang diperoleh di Tawau. Pada saat itu pengolahan tanaman dilakukan oleh seorang yang mempunyai pengalaman bekerja di perkebunan coklat Tawau. Usaha ini yang selanjutnya memunculkan usaha ekonomi produktif di masyarakat Sebatik hingga sekarang. Usaha ini didukung oleh adanya usaha jasa transportasi angkutan laut dengan adanya *boat* penumpang dari Tarakan ke Sebatik.

Pada dasarnya perekonomian Sebatik dengan Kota Tawau saling bergantung. Tawau membutuhkan barang hasil pertanian dari Sebatik, sebaliknya Sebatik pun membutuhkan barang industri dari Tawau, mengingat jarak ke Nunukan dan Tarakan lebih jauh. Oleh karena ketergantungan barang industri demikian besar terhadap Tawau, maka transaksi perdagangan lebih banyak dilakukan dengan menggunakan uang ringgit dibanding rupiah. Pemerintah telah mencoba membuat peraturan untuk menggunakan uang rupiah dalam pembayaran, namun hal tersebut sulit dilakukan, mengingat pembelian barang di Tawau menggunakan ringgit, sehingga bila dikonversi dalam rupiah pedagang merasa rugi.

Perkembangan ekonomi yang ada maupun yang akan dirintis adalah komoditi perekonomian seperti udang, coklat, dan kelapa sawit, namun belum jelas terlihat secara pasti. Pada umumnya usaha ini dilakukan oleh penduduk setempat, yang di antaranya mencoba membuat usaha kerjasama dengan pengusaha atau tauke di Tawau. Kondisi ini didukung dengan belum adanya sarana/prasarana ekonomi yang memadai untuk melakukan usaha transaksi ekonomi di Sebatik, sehingga masih tergantung dengan Tawau – Sabah. Contohnya, sarana transportasi, komunikasi telpon, Bank, dan pasar yang merupakan sarana dasar bagi perkembangan ekonomi masyarakat atau daerah Sebatik, belum tersedia.

Dalam usaha perdagangan ikan, pemerintah mencoba membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menjaring ikan-ikan sebelum dibawa atau dijual ke Tawau, namun aktifitas ini tidak jalan. TPI tetap kosong, dan hasil laut Indonesia dapat langsung dibawa ke Tawau yang nantinya diekspor ke negara lain oleh tauke penampung. Permasalahannya karena belum ada perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, serta keterbatasan sumberdaya manusia untuk mengemas ikan yang siap ekspor. Pengemasan ini sangat penting karena ikan-ikan itu tidak hanya sampai di Tawau, tapi akan diekspor kembali ke negara-negara lain.

3.2. Pembangunan Sosial

Perkembangan jumlah penduduk yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, khususnya di daerah kepulauan, sangat dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi masuk ke wilayah ini. Keadaan ini tentu akan berdampak terhadap pembangunan sosial, yang dalam prosesnya tidak sama, karena sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan dan tingkat kebutuhan yang ada di masyarakat. Kondisi ini jelas terlihat di wilayah perbatasan Propinsi Kalimantan Timur, di mana ada perbedaan antara pembangunan sosial di wilayah daratan dan kepulauan. Untuk wilayah daratan, sangat terkait dengan kondisi sarana/prasarana transportasi yang lebih sulit dibanding dengan wilayah kepulauan. Daerah kepulauan yang merupakan daerah transit menuju Tawau, mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan pengembangan dalam kehidupan sosial maupun kondisi yang mendukung aktifitas sosial tersebut.

Wilayah Daratan

Umumnya tingkat aksesibilitas wilayah pedalaman Propinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan rendah dan sulit dijangkau dari wilayah Indonesia lain. Wilayah perbatasan daratan yang hanya dapat dijangkau dengan pesawat, terbatas

pada kota kecamatan tertentu seperti Kecamatan Lumbis, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Pujungan. Di samping transportasi udara, yang paling umum dilakukan di hampir seluruh wilayah daratan adalah transportasi sungai. Jalan darat baru merupakan rencana, yaitu 'Trans Kalimantan' lintas utara dari Kabupaten Kutai menuju Long Bawan, yaitu beberapa desa perbatasan di wilayah Kecamatan Mentarang yang juga merupakan desa-desa perbatasan. Namun rencana ini menimbulkan permasalahan berkaitan dengan pengelolaan 'Kawasan Taman Nasional' oleh *World Wild Fund* (WWF), seluas 1.600.000 hektar, karena jalan tersebut melalui kawasan tersebut

Dengan aksesibilitas sosial dan ekonomi yang sangat terbatas, berdampak terhadap mobilitas penduduk sehingga mobilitas yang dilakukan umumnya bertujuan untuk mendekati fasilitas pelayanan yang dibutuhkan (Raharto dkk, 1998:123). Gerakan ini ada yang mendekati fasilitas yang ada di wilayah Indonesia, dan ada yang ke arah perbatasan Malaysia. Misalnya, penduduk Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir lebih mudah pergi ke wilayah Malaysia, yaitu camp-camp konsesi kayu di Malaysia, untuk memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini juga terjadi pada penduduk Pujungan perbatasan yang biasa menggunakan fasilitas pengobatan di Desa Long Banga wilayah Malaysia. Kemudahan ini diperoleh karena adanya hubungan kekerabatan antara suku yang tinggal di wilayah Indonesia dan Malaysia. Biasanya di desa-desa pedalaman ini ada subsidi transportasi untuk membawa kebutuhan pokok masyarakat, namun hanya sampai kota kecamatan, sehingga banyak penduduk yang tinggal jauh di pedalaman yang tidak sempat mendapatkan barang kebutuhan akan mencari ke Malaysia.

Keterbatasan sarana/prasarana sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan bagian daratan, akan berdampak terhadap sumberdaya manusia yang merupakan modal penting pembangunan di wilayah tersebut. Desa-desa perbatasan umumnya baru memiliki Sekolah Dasar Inpres, dan untuk pendidikan lanjutan masyarakat harus ke kota kecamatan. Namun, kondisi geografis yang membuat jarak tempuh menjadi jauh, menghambat proses pendidikan, di samping alasan lain yang ada, yang berhubungan dengan budaya penduduk serta sistim

pendidikan yang diterapkan. Sistem yang diterapkan pemerintah secara merata seperti 'rayonisasi' menimbulkan permasalahan karena sangat sulit bila diterapkan pada daerah-daerah terpencil. Selain dari itu, untuk Propinsi Kalimantan Timur juga tidak ada insentif bagi guru yang tinggal di daerah terpencil, yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap tenaga-tenaga pengajar yang berjuang di daerah terpencil. Pemerintah daerah juga melaksanakan pengembangan pendidikan 'SD kecil' untuk daerah terpencil, namun belum ada data pasti di mana dan berapa banyak yang sudah melaksanakan.

Dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia di wilayah perbatasan ini, tahun 1984 sebanyak 40 orang penduduk Dayak Krayan pernah mengikuti pendidikan tentang pertanian buah apel dan sayur-sayuran di Malang. Usaha ini dilaksanakan pemerintah dengan melihat kondisi geografis daerah Krayan yang sejuk sehingga cocok untuk buah apel dan sayur-sayuran. Keterampilan ini tidak membawa dampak positif yang besar pada daerah Krayan karena sulitnya pemasaran hasil, termasuk pemasaran ke Malaysia. Akibatnya peserta kursus yang pemikirannya lebih maju, berbekal pengetahuan dan keterampilan yang didapat di Malang, pergi ke wilayah Malaysia untuk bekerja di perkebunan apel penduduk Malaysia, dengan alasan bekerja pada 'keluarga' sendiri. Dilihat dari sisi individu, ada keuntungan yang diperoleh, tetapi untuk pembangunan daerah ini merupakan kehilangan sumberdaya manusia berpotensi untuk menunjang pembangunan, karena penduduk yang sudah terampil dengan modal negara dimanfaatkan 'orang sebelah'.

Permasalahan sosial mendasar lainnya juga terjadi di bidang kesehatan. Kondisi geografis dan fasilitas yang tidak mendukung membuat penduduk pergi ke wilayah Malaysia untuk mencari pengobatan. Menurut informasi penduduk dan *stakeholders* lain, fasilitas kesehatan di camp-camp perusahaan perkebunan di Malaysia atau di desa-desa perbatasan bagian Malaysia lebih mudah dijangkau dibanding dengan Puskesmas yang umumnya ada di ibukota kecamatan. Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh masyarakat, namun juga petugas kesehatan. Keterbatasan sarana/prasarana transportasi dan persediaan obat sering menghambat

tugas mereka. Program-program pemerintah yang masuk sulit berjalan dengan tepat waktu serta seperti apa yang diharapkan. Misalnya, pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) di wilayah perbatasan Sebuku sangat terlambat, karena proses pendataan baru dimulai sekitar bulan Oktober 1998. Ada dua hal penyebab keterlambatan ini, yaitu: (1) keterlambatan pemberitahuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bulungan, dan (2) kurangnya petugas kesehatan, dalam hal ini BDD (Bidan Di Desa), sebagai petugas yang mendata. Permasalahan kedua, sangat terkait dengan kondisi wilayah perbatasan Sebuku yang tidak bisa ditempuh kecuali melalui sungai, dengan biaya yang cukup besar. Padahal penduduk miskin yang akan di data bertempat tinggal terpencar-pencar di daerah yang sulit dijangkau.

Pembangunan yang bersifat sosial lain yang pernah ada di wilayah perbatasan bagian darat adalah yang dilakukan oleh pihak Koramil dalam rangka pembinaan teritorial. Karena keterbatasan petugas yang ada, maka penempatan BABINSA (Bintara Pembina Desa) secara merangkap, yaitu satu orang untuk dua atau tiga desa. Kegiatan pembinaan teritorial untuk desa-desa pedalaman ini antara lain adalah membina pertanian masyarakat, seperti tanaman jagung dan kacang. Pilihan jenis tanaman ini diharapkan dapat menggantikan *iloi* yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Dayak, karena dianggap tingkat nutrisinya kurang baik dan berbahaya bagi kesehatan. Program ini dibantu pula oleh kegiatan HPH Bina Desa yang ada di daerah tersebut. Dalam melaksanakan program ini terutama terbentur pada minimnya dana operasional yang ada, yaitu hanya Rp 125.000 per bulan. Pada waktu itu transport sekali jalan dari Nunukan ke Sebuku kira-kira menghabiskan biaya sekitar Rp. 250.000,- untuk bahan bakar, belum untuk logistik dan sebagainya.

Wilayah Kepulauan

Kecamatan Nunukan dan Sebatik sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan pusat ekonomi Negara Bagian Sabah, merupakan pintu masuk paling strategis bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan mencari kerja di Tawau. Dilihat dari

daerah asal para TKI, terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan, diikuti Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan daerah lain di Propinsi Kalimantan Timur. Situasi ini berdampak terhadap perkembangan daerah itu sendiri, termasuk pembangunan sosial dan pemanfaatan maupun pengembangan sumberdaya yang ada.

Di Kecamatan Nunukan, khusus bagian kepulauan, pemusatan penduduk tersebar di empat desa dan terpadat di Desa Nunukan Utara sebagai pusat kota. Apabila dilihat dari tingkat sirkulasi penduduk, hampir di semua desa mempunyai tingkat sirkulasi penduduk yang cepat. Kondisi ini mungkin disebabkan karena tingginya tingkat arus keluar masuk penduduk yang dapat dilihat pada saat kapal penumpang masuk. Salah satu dampak yang nyata dari tingginya tingkat mobilitas penduduk, dan menjadikan pulau ini sebagai daerah transit adalah kelengkapan infrastruktur, yang dapat dikatakan lengkap untuk pulau yang relatif kecil (979,40 hektar). Fasilitas yang ada antara lain, yaitu pelabuhan kapal besar, pelabuhan kapal dan motor boat, pasar, Bank, perkantoran pemerintah yang umumnya terkait dengan permasalahan tenaga kerja dan migrasi penduduk, tempat-tempat hiburan dan penginapan.

Bila dilihat dari kondisi sosial yang bersifat infrastruktur di atas memperlihatkan, bahwa secara umum sarana/prasarana yang ada lebih menunjang untuk kebutuhan pendatang yang umumnya datang dan pergi secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat dilihat dari permasalahan kesehatan baik dari sisi sarana/prasarana yang ada, yang tidak memungkinkan lagi untuk melayani kebutuhan kesehatan penduduk, terutama pada saat terjadi kehadiran pendatang dalam jumlah besar. Dalam pembangunan kesehatan ini, umumnya pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk perbatasan, antara lain dengan peningkatan jaringan pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes, dan Posyandu sebagai partisipasi aktif dari masyarakat. Di samping itu, ada beberapa program kesehatan yang berusaha untuk menjangkau masyarakat kelompok pra keluarga sejahtera, sejahtera I dan miskin lain, seperti program PMTAS dan terakhir program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Khusus untuk

program-program terakhir, karena ditujukan lebih kepada daerah IDT (Inpres Desa Tertinggal), maka untuk wilayah kepulauan di perbatasan ini kurang berlaku. Desa IDT hanya ada satu di Pulau Sebatik, yaitu Desa Setabu. Sementara itu, bila dilihat secara umum, keberadaan pusat-pusat pelayanan kesehatan tersebut terasa kurang untuk melayani penduduk yang demikian bervariasi seperti di Pulau Nunukan.

Puskesmas Kecamatan Nunukan yang terletak di Kota Nunukan hanya dilayani oleh seorang dokter. Pada tahun ini (1998) tugas dokter Puskesmas ini berkurang dengan adanya dokter PTT baru untuk wilayah kecamatan Nunukan bagian darat, yaitu dengan penempatan di Desa Pembeliangan (Sebuku). Namun tampaknya usaha tersebut belum memecahkan permasalahan kesehatan yang ada. Tingginya tingkat mobilitas penduduk di pulau ini, menyebabkan jenis penyakit pun bertambah, tidak hanya penyakit-penyakit umum, tetapi mulai muncul penyakit khusus seperti 'penyakit jiwa'. Di samping itu, dengan berkembangnya pusat-pusat hiburan seperti karaoke, diskotik, dan praktek pelacuran, dapat diantisipasi kemungkinan munculnya Penyakit Menular Seksual (PMS). Sisi lain, dikaitkan dengan masuknya obat-obat terlarang, berdampak terhadap perkembangan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat tersebut. Permasalahan sosial ini dengan pasti tidak dapat ditangani oleh Puskesmas yang secara umum hanya menangani penyakit-penyakit umum di masyarakat.

Permasalahan kesehatan di atas belum muncul di Pulau Sebatik karena pulau ini belum merupakan daerah transit secara terbuka. Namun dengan perkembangan pusat hiburan dan rencana untuk menarik wisatawan dari Tawau ke pulau ini, kemungkinan munculnya permasalahan PMS tidak terhindarkan. Menurut dokter Puskesmas (tahun 1997) indikasi ke arah penyakit tersebut telah ada, tapi belum terdeteksi secara mendalam dengan alasan peralatan yang dipunyai belum lengkap. Permasalah kesehatan di pulau ini lebih kepada pelayanan kesehatan yang dapat dilayani oleh dokter Puskesmas tersebut, terutama pada daerah yang akses transportasinya masih sulit. Pada setiap desa umumnya telah ada Pustu dan Polindes dengan petugas kesehatan Mantri dan Bidan Di Desa (BDD), namun untuk kunjungan

dokter ke desa-desa tersebut secara teratur masih terasa berat. Misalnya, Desa Setabu masih sulit dijangkau karena wilayah ini cukup jauh dari pusat kecamatan, sedang akses jalan maupun transportasi masih sulit dan terbatas.

Dusun-dusun yang masuk wilayah Desa Setabu hanya dapat dicapai dengan perahu, atau berjalan kaki, sedang petugas kesehatan yang langsung menangani kesehatan di desa ini sangat terbatas, yaitu hanya satu orang BDD yang berdomisili di Dusun Mantikas di mana penduduknya dominan Suku Bugis. BDD yang ditempatkan di pusat desa yang umumnya dihuni orang Tidung tugasnya berakhir bulan Nopember 1998, sehingga di wilayah ini Pustu dipegang oleh perawat. Untuk penanganan kesehatan yang tidak bisa diatasi oleh petugas kesehatan di Setabu dibawa ke Puskesmas Nunukan yang lebih mudah dicapai dibanding ke Puskesmas di Sei Nyamuk (Sebatik). Kepala Desa Setabu berharap, dalam penanganan permasalahan kesehatan di wilayahnya paling tidak ada dua orang bidan yaitu satu di wilayah orang Bugis, dan satu lagi di pusat desa tempat berdomisili orang Tidung.

Secara umum, fasilitas fisik pelayanan kesehatan di Kecamatan Sebatik cukup memadai. Namun secara khusus, dalam penyediaan sumberdaya manusia masih sangat kurang. Untuk desa yang terpencar-pencar dan sulit dijangkau perlu pemikiran penempatan petugas kesehatan, agar penduduk tidak terpaksa dan memilih untuk pergi berobat ke Tawau. Dilihat dari fasilitas fisik, misalnya, Puskesmas di Sei Nyamuk mempunyai gedung yang teratur dengan baik, dilengkapi dengan kamar rawat inap; bahkan ada kamar menggunakan fasilitas AC. Fasilitas lain, keberadaan toko-toko obat, di Sei Nyamuk saja ada kira-kira tiga buah untuk melayani kebutuhan obat, berdasarkan resep dokter. Dokter praktek ada dua orang, yaitu satu dokter Puskesmas dan lainnya dokter swasta. Perkembangan sarana/prasarana kesehatan di wilayah perbatasan walaupun belum memuaskan 100 persen, turut menghambat penduduk untuk pergi berobat ke Tawau. Sebelum ada Puskesmas, penduduk perbatasan sangat tergantung pada pelayanan kesehatan yang ada di Tawau. Ini disebabkan karena dari sisi transportasi lebih mudah ke Tawau dibanding ke Tarakan, atau adanya kerabat yang tinggal di Tawau. Menurut informasi, keadaan rumah sakit

umum di Tawau sama dengan rumah sakit umum di Indonesia, yang baik adalah klinik swasta.

Pembangunan sumberdaya manusia di daerah perbatasan kepulauan yang juga mendesak untuk diperhatikan adalah pendidikan. Di Kecamatan Sebatik, sarana dan prasarana yang ada terbatas, pada tingkat sekolah lanjutan ada satu buah dan satu buah SLTA. Keterbatasan sarana pendidikan lanjutan ini memaksa penduduk pergi ke Nunukan atau Tarakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Situasi ini sangat terkait dengan kondisi ekonomi orang tua karena yang dibutuhkan tidak hanya biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup bila harus tinggal di kota tersebut. Permasalahan lain yang menghambat peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah 'mau atau tidak' nya anak bersekolah, atau persepsi orang tua terhadap pendidikan anak. Di Kota Nunukan, misalnya, banyak diantara anak-anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan jual-beli uang (valuta asing/valas) serta bekerja sebagai kuli angkut barang. Pendapatannya cukup besar dilihat dari sudut umur anak-anak tersebut. Ini dikhawatirkan akan mempengaruhi semangat belajar anak, karena mereka sudah mengenal nilai uang.

Khusus untuk wilayah kepulauan, dengan meningkatnya mobilitas penduduk di wilayah ini tampaknya tingkat kriminal pun bertambah. Pada saat ini tingkat kriminal yang ada masih dikategorikan sebagai 'kriminal rendah' karena sifatnya baru pada perkelahian dan pencurian 'tradisional'¹. Namun dengan berhasil ditangkapnya pengedar uang palsu 'ringgit' menunjukkan indikasi kriminalitas yang tinggi. Apalagi dengan adanya sinyalemen pengedaran obat-obat terlarang, dan penyelundupan baik dari wilayah Indonesia maupun dari Malaysia, memungkinkan daerah ini menjadi tempat pertemuan para kriminal-kriminal tersebut. Dengan demikian, sebutan Kota Nunukan sebagai 'Texas Indonesia' bisa saja menjadi kenyataan bila kondisi sosial tersebut tidak diantisipasi sejak dini. Pengembangan yang perlu diperhatikan, selain sumberdaya manusia bidang terkait seperti polisi, adalah perlengkapan dalam

¹ Pencurian tradisional adalah tindakan pencurian yang dianggap masih bersifat kecil-kecilan seperti pengambilan alat-alat rumah tangga. Maksudnya bukan bersifat seperti 'perampokan'.

mendeteksi kegiatan-kegiatan yang berbau kriminal. Misalnya, alat untuk pendeteksian uang palsu dan laboratorium forensik. Di samping itu, perlu pengembangan sarana sosial yang dapat menjaring anak muda setempat tidak terjerat dalam kegiatan kriminal. Pertimbangan ini dengan melihat kenyataan banyaknya anak-anak yang sudah terlibat dalam penjualan valas (valuta asing) di pasar-pasar dan aktifitas karaoke atau diskotik .

Pembangunan sosial di daerah perbatasan Kalimantan Timur tampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Ini sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis daerah maupun kondisi sumberdaya manusianya. Dalam kondisi keterbatasan ini perlu dipertimbangkan pola pembangunan sosial yang akan diterapkan. Di bidang pendidikan, misalnya, sebagai salah satu cara peningkatan kualitas sumberdaya manusia, keberadaan guru seharusnya berfokus pada tugasnya sebagai pendidik tanpa memikirkan bagaimana cara mengambil gaji dalam kondisi geografis yang sulit. Pemecahannya mungkin dengan meningkatkan pelayanan kantor pos atau Bank Pos. Dari sisi murid, harus dipertimbangkan kembali keefektifan sistim rayon yang memudahkan murid bersekolah dalam kondisi geografis yang sulit ini.

Di bidang kesehatan, khusus untuk wilayah perbatasan bagian darat yang hanya bisa dilalui oleh transportasi sungai, perlu dipikirkan pengadaan 'Ambulan Sungai' untuk memudahkan petugas kesehatan dalam pencapaian daerah-daerah yang jauh. Karena itu, program JPS yang ada, bila pada satu daerah tidak ada penduduk miskin, dana yang tersedia lebih baik dialihkan kepada pengembangan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Misalnya untuk Puskesmas Nunukan dibangun laboratorium yang lebih baik, peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit, serta penambahan petugas kesehatan untuk menangani permasalahan khusus di bidang kesehatan.

Permasalahan lain yang perlu ditinjau berkaitan dengan pembangunan sosial di wilayah perbatasan, adalah pengembangan wisata yang lebih terarah. Pemikiran ini karena ada beberapa daerah yang mempunyai potensi dan terbuka untuk kegiatan tersebut. Misalnya Kecamatan Krayan dan Pulau Sebatik bisa dikembangkan, namun

perlu perencanaan yang tepat sesuai dengan permintaan, kondisi penduduk, serta kondisi lingkungan daerah tersebut. Khusus untuk Pulau Nunukan dan Sebatik yang paling besar kena imbas pendatang, perlu kesadaran kepada pendatang akan rasa memiliki wilayah tersebut. Hal ini penting mengingat banyaknya para pendatang berdampak terhadap kurangnya perhatian terhadap lingkungan, sanitasi kota, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

3.3. Pembangunan Pertahanan Keamanan (HANKAM)

Ditinjau dari letak geografis, daerah perbatasan mempunyai arti strategis karena langsung berbatasan dengan negara tetangga. Tetapi daerah ini juga mempunyai potensi kerawanan yang tinggi terutama dilihat dari jumlah penduduk serta persebarannya. Selain dari itu, pembangunan ekonomi daerah perbatasan yang masih sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya serta keterisolasian daerah berdampak terhadap kondisi Pertahanan Keamanan (HANKAM) di daerah ini. Akibat minimnya ketersediaan sarana dan prasarana di daerah perbatasan, penduduk pindah meninggalkan daerah perbatasan baik untuk mendekati fasilitas hidup di Indonesia, bahkan juga di negara tetangga. Dengan demikian daerah perbatasan menjadi kosong. Selain dari itu, pembangunan yang lebih pesat di wilayah negara tetangga menyebabkan penduduk daerah perbatasan lebih berorientasi ke negara tetangga dalam berbagai aspek kehidupan. Keadaan ini dengan sendirinya menimbulkan kerawanan di bidang hankam di daerah perbatasan. Sumber kerawanan lainnya adalah kegiatan penyelundupan barang-barang terutama barang-barang terlarang dan mobilitas tenaga kerja ilegal.

Eksploitasi sumberdaya alam di wilayah perbatasan sebenarnya merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Pemberian HPH misalnya, diharapkan dapat berdampak pada pembangunan sabuk pengaman di daerah perbatasan. Pembangunan daerah transmigrasi, selain diharapkan dapat berdampak pada penyebaran penduduk yang lebih merata di daerah perbatasan juga dapat menjadi penahan arus mobilitas tenaga kerja ilegal ke negara tetangga.

Dengan berkembangnya daerah transmigrasi diharapkan akan berdampak pada pembangunan daerah perbatasan umumnya serta terbukanya lapangan kerja di daerah perbatasan.

Pembangunan di bidang hankam yang secara langsung berhubungan dengan keamanan di daerah perbatasan mencakup ketersediaan sarana/prasarana pertahanan keamanan serta aparat keamanan. Sampai saat ini dari informasi yang di dapat di lapangan ketersediaan aparat keamanan ini dirasakan masih sangat kurang. Selain dari itu, sarana/prasarana yang menunjang pemeliharaan keamanan di perbatasan juga sangat terbatas. Akibatnya, tidak dapat mengimbangi kemajuan teknologi pelanggaran yang berdampak terhadap keamanan seperti pencurian kayu dan kegiatan penyelundupan.

Permasalahan dalam pemeliharaan keamanan di daerah perbatasan dapat dilihat dari kegiatan pemantauan daerah perbatasan Kecamatan Nunukan, khususnya di wilayah daratan Simanggaris. Sepanjang lebih dari 127 kilometer wilayah perbatasan ini mempunyai topografi yang kasar dan sulit dilalui. Untuk pemantauan dari darat harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar satu minggu, sehingga pemantauan daerah tersebut sebetulnya paling praktis dilakukan melalui udara. Namun dengan segala keterbatasan, ini sulit dilakukan sehingga tidak dapat dipantau kegiatan-kegiatan yang bersifat ilegal oleh 'oknum' dari pihak Malaysia dalam usaha mengambil kayu di bagian Indonesia. Tertangkapnya beberapa traktor milik 'oknum' Malaysia, atas usaha masyarakat, yang telah berani menembus 30 kilometer ke dalam hutan di wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa pihak Malaysia tidak hanya melanggar sistem tapal batas, namun juga undang-undang konservasi karena ada ketentuan bahwa 1,5 kilometer dari garis batas masing-masing negara merupakan kawasan hutan lindung yang tidak boleh dibuka.

Untuk wilayah perairan, pihak Indonesia melakukan penjagaan dengan adanya Pos gabungan yang terdiri dari peleton Marinir Angkatan Laut dan Peleton dari Batalyon 613 Balikpapan di Sei Nyamuk. Permasalahan yang dihadapi pun terbentur dengan tidak adanya sarana yang memadai untuk melakukan patroli di laut, seperti

sarana perahu yang memadai agar dapat melakukan pengamanan di laut baik dari para penyelundup, maupun kapal-kapal perompak; biasanya orang-orang dari Filipina.

Untuk mengatasi permasalahan Hankam di daerah perbatasan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga sudah melakukan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan kedua negara ini. Perjanjian dimulai dengan ditandatanganinya dasar lintas batas kedua negara di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1967. Perjanjian ini dikenal dengan 'Persetujuan Lintas Batas Antara Republik Indonesia dan Negara Malaysia' (*Agreement on Border Crossing between The Republic of Indonesia dan Malaysia*). Perjanjian ini terus berkembang karena masih dirasa banyak kekurangan, yang terakhir dengan perjanjian di Medan pada tanggal 12 Mei 1984, sebagai pedoman dalam penanganan permasalahan perbatasan (Raharto dkk., 1998:91 – 92). Isi dari perjanjian ini antara lain adalah kemudahan yang diberikan bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan. Di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, ini mencakup penduduk di wilayah Kecamatan Lumbis, Kerayan, Nunukan, dan Sebatik dengan wilayah Negara Sabah di Sipitung, Pensiangan, Tenom, dan Tawau. Untuk kemudahan kunjungan penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan, didirikan Pos Lintas Batas yang hanya dapat digunakan oleh penduduk tersebut di atas. Ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelintasan batas secara tidak sah (ilegal).

Di samping perjanjian di atas, antara dua negara juga ada perjanjian yang lebih difokuskan pada permasalahan sosial – ekonomi, yang dikenal dengan 'Program Sosek – Malindo'. Pada umumnya, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kedua belah pihak, baik Republik Indonesia maupun Negara Malaysia. Untuk itu disepakati kerjasama antara lain di bidang sosial – budaya, bidang keamanan, bidang ekonomi, dan bidang administrasi. Kerjasama di bidang budaya telah dilaksanakan dengan kegiatan pertukaran seni dan pertandingan olah raga baik di wilayah Malaysia, maupun Indonesia. Bidang ekonomi dalam bentuk kerja sama pengembangan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, sedang bidang keamanan dalam permasalahan patok batas wilayah.

Untuk bidang keamanan dan ketahanan masyarakat perbatasan, dari pihak Indonesia telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pendirian pos-pos keamanan baik di pintu masuk wilayah darat maupun perairan. Namun tampaknya, pengembangan pos-pos penjagaan lebih berfokus di wilayah perairan, yang terlihat dari kurangnya penjagaan di wilayah daratan. Ini mungkin disebabkan pada pertimbangan bahwa di wilayah perairan tingkat mobilitas penduduk lebih tinggi dibanding wilayah darat. Seperti di Kecamatan Sebatik, pengamanan daerah perbatasan tercermin berlapis-lapis dengan adanya Pos Angkatan Laut, Pos Marinir, Pos Militer, Kepolisian, Pasukan Penjaga Perbatasan, Pos Pembantu Imigrasi, Syahbandar dan Bea Cukai.

BAB IV

KONSEP DAN STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN: TINJAUAN SOSIAL-DEMOGRAFI

Pembangunan daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan potensi daerah tersebut. Daerah perbatasan di Indonesia umumnya merupakan daerah terpencil yang seringkali sangat tertinggal dalam pembangunan. Padahal, daerah tersebut merupakan daerah rawan permasalahan sosial karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan di daerah perbatasan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang erat berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia (Aswatini dkk, 1994, 1995, 1995a; Bandiyono dkk, 1996, 1997; Raharto, 1998). Untuk itu diperlukan alternatif-alternatif usaha yang dapat meningkatkan usaha pengembangan sumberdaya manusia di daerah perbatasan dalam kerangka pembangunan yang lebih luas, yaitu pembangunan ekonomi.

4.1. Isu dan permasalahan

Daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan. Dari tinjauan sosial-demografi, permasalahan yang ada di daerah perbatasan ini sangat erat kaitannya dengan arus mobilitas penduduk baik mobilitas internal maupun mobilitas internasional. Sebagai daerah perbatasan, mobilitas penduduk internal yang penting dampaknya terhadap daerah perbatasan adalah perginya penduduk (penduduk lokal) meninggalkan daerah perbatasan sehingga daerah ini menjadi kosong. Ini terjadi di beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Bulungan yang terletak di daratan Pulau Kalimantan. Tetapi di daerah perbatasan laut seperti di Pulau Nunukan dan Sebatik, arus mobilitas (penduduk) masuk cukup berarti untuk perkembangan daerah tersebut. Di Pulau Nunukan, khususnya kota Nunukan, tingginya mobilitas masuk ini dipengaruhi oleh arus tenaga kerja Indonesia yang akan menyebrang ke Malaysia dan menjadikan Kota Nunukan sebagai daerah transit. Selain dari itu, penduduk pendatang dari daerah lain yang sudah menetap di wilayah ini juga cukup signifikan proporsinya.

Mobilitas penduduk dapat dianggap sebagai suatu respon terhadap adanya ketidakseimbangan sumberdaya antara dua daerah, daerah asal dan daerah tujuan. Ketidakseimbangan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan potensi sumberdaya alam, tingkat pembangunan ekonomi maupun faktor sosial lainnya. Untuk daerah perbatasan di Kalimantan Timur, tingginya arus mobilitas penduduk meninggalkan daerah perbatasan sangat erat kaitannya dengan kurangnya pembangunan yang mempertimbangkan kepentingan serta kondisi masyarakat setempat. Sebaliknya di daerah perbatasan pantai, banyak kesempatan dimanfaatkan oleh pendatang sehingga penduduk lokal juga agak tertinggal, meskipun secara umum adanya mobilitas penduduk masuk ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan serta akses yang tidak merata bagi setiap anggota masyarakat di daerah tersebut. Dengan melihat kondisi ini,

isu dan permasalahan utama yang berkaitan dengan pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan Timur mencakup:

1. Isu yang berkaitan dengan potensi sumberdaya manusia, yang mencakup:
 - Rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Manifestasi dari seriusnya permasalahan ini dapat dilihat dari aspek pendidikan dan keterampilan serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dari aspek pendidikan rendahnya kualitas sumberdaya manusia terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan penduduk secara umum. Keterampilan penduduk juga sangat rendah, yang dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari yang masih memanfaatkan cara-cara tradisional, sehingga tidak berpotensi untuk peningkatan nilai tambah dan tidak mampu bersaing dengan teknologi di negara tetangga (Malaysia). Selain dari itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, khususnya diantara penduduk lokal, masih merupakan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) dan kurang berorientasi komersil. Kalaupun ada usaha-usaha yang beorientasi komersil, hanya dimonopoli oleh segelintir pemilik modal besar yang umumnya juga merupakan pendatang. Padahal, untuk daerah perbatasan di Kabupaten Bulungan, khususnya yang mempunyai perbatasan laut potensi pemasaran ke negara tetangga cukup besar.
 - Jumlah sumberdaya manusia yang relatif kecil dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia serta penyebaran yang tidak merata. Manifestasi dari seriusnya permasalahan ini dapat dilihat dari rendahnya kepadatan penduduk di daerah perbatasan, khususnya di pedalaman daratan Pulau Kalimantan. Ini berkaitan erat dengan kurangnya intervensi pembangunan di daerah tersebut yang langsung menyentuh masyarakat sehingga penduduk terpaksa pindah untuk mendekati fasilitas-fasilitas hidup baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta fasilitas lainnya.
2. Isu yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang mencakup:
 - Pemanfaatan sumberdaya alam yang belum optimal untuk menunjang pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan akses yang

sama untuk setiap anggota masyarakat. Manifestasi dari seriusnya permasalahan ini dapat dilihat dari eksploitasi sumberdaya alam (seperti hutan) yang selama ini ada hanya dinikmati oleh pemilik modal dari luar sedangkan penduduk setempat tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan, yang dapat dilihat dari kualitas sumberdaya manusianya.

- Pemanfaatan sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi dan kurang mempertimbangkan keseimbangan lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Manifestasi dari seriusnya permasalahan ini dapat dilihat dari kondisi hutan di daerah perbatasan yang sudah memprihatinkan akibat pencurian-pencurian kayu yang melibatkan pengusaha Indonesia maupun pengusaha negara tetangga.

4.2. Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan Daerah Perbatasan

4.2.1. Prinsip Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Timur

Daerah perbatasan merupakan daerah yang rawan akan sumber konflik. Untuk daerah perbatasan di Kabupaten Bulungan, kerawanan ini bukan saja disebabkan karena letaknya yang berbatasan dengan negara tetangga tetapi juga karena disebabkan tingginya arus mobilitas penduduk baik mobilitas internal maupun internasional. Dengan demikian, ada beberapa pertimbangan prinsip dalam menyusun konsep dan strategi pembangunan di daerah perbatasan ini yaitu:

- Pembangunan daerah perbatasan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat.
- Pembangunan daerah perbatasan harus memberi peluang yang sama baik untuk penduduk lokal maupun pendatang.

- Pembangunan daerah perbatasan harus dapat memenuhi kepentingan pertahanan keamanan dan
- Pembangunan daerah perbatasan harus dapat meningkatkan kebutuhan kerjasama dengan negara tetangga.
- Pembangunan daerah perbatasan harus mempertimbangkan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan sebab SDA tersebut bukan merupakan sesuatu yang tanpa batas ketersediannya.
- Pembangunan daerah perbatasan juga harus menunjukkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor serta regional dan nasional.

4.2.2. Pendekatan Pengembangan Strategi Alternatif

Dengan mempertimbangkan keenam prinsip tersebut di atas, konsep pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Timur harus merupakan konsep yang terpadu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut. Ada dua mekanisme perencanaan yang dikenal di Indonesia yaitu mekanisme perencanaan dari atas (*top-down planning*) dan mekanisme perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*). Kedua mekanisme ini seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi saling melengkapi. Perencanaan pembangunan dari atas umumnya diterapkan melalui program-program sektoral dan biasanya kurang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang mendasar. Adanya mekanisme perencanaan dari bawah memungkinkan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan regional maupun nasional. Dalam era reformasi ini, usaha-usaha untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat sudah semakin kritis dalam menilai ketimpangan-ketimpangan, yang merupakan sumber konflik, yang terjadi disekitarnya.

Usaha untuk menggali kepentingan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab bertingkat yang mencakup berbagai unit sosial: individu, keluarga, komunitas dan masyarakat serta negara. Di

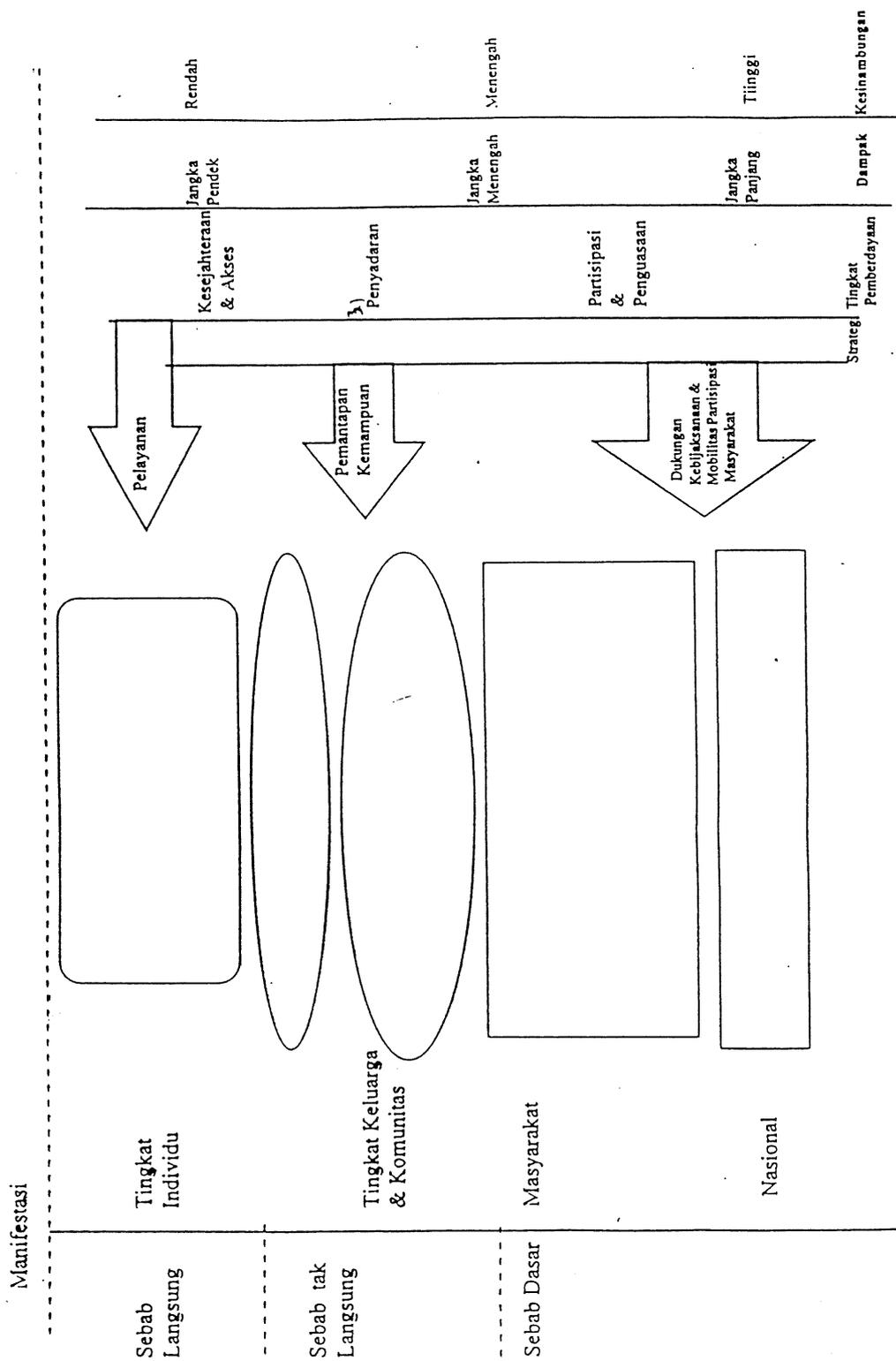
tingkat individu, upaya ini dipengaruhi oleh faktor penyebab langsung yang berpengaruh terhadap kinerja masyarakat. Di tingkat keluarga dan komunitas dipengaruhi faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi persepsi seseorang, keluarga dan masyarakat. Faktor penyebab ini erat kaitannya dengan proses sosialisasi yang didasari pengetahuan dan persepsi individu, keluarga serta komunitas dalam menciptakan perilaku. Di tingkat masyarakat luas, dipengaruhi faktor penyebab mendasar yang mencakup antara lain struktur ekonomi, tatanan budaya, tatanan masyarakat serta kondisi dan letak geografis.

Untuk dapat mengintegrasikan kepentingan serta aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diperlukan usaha untuk menghilangkan pengaruh faktor-faktor penyebab tersebut. Usaha ini dapat dilihat dari berbagai strategi yang disesuaikan dengan (lihat Skema 1):

- Jenjang masalah (yang berkaitan dengan faktor penyebab langsung, tidak langsung dan mendasar).
- Kelompok target berdasarkan atas unit sosial (individu, rumah tangga dan komunitas, masyarakat dan negara).

Proses pembangunan seharusnya melibatkan setiap kelompok target sebagai peserta dalam proses tersebut. Karena itu, masing-masing kelompok target, baik laki-laki maupun perempuan, bukanlah penikmat hasil pembangunan yang pasif, tetapi seharusnya mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam mengenali serta menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi. Alternatif strategi untuk pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Timur, khususnya daerah perbatasan Kabupaten Bulungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar masyarakat setempat dalam dilihat dalam Skema 2.1 dan Skema 2.2.

Skema 1: Alur Berpikir Analisa Jenjang Masalah



Skema 2.1: Matrik Pendekatan Untuk Pemecahan Masalah dalam Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	Pelaksana kegiatan
Langsung	Tingkat masalah individu	Mahalnya biaya pendidikan lanjutan	Peningkatan akses untuk mendapatkan pendidikan lanjutan	Jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian beasiswa un-tuk siswa berprestasi Gerakan orangtua asuh lebih dintensifkan dengan prioritas daerah perbatasan yang relatif lebih terpencil Program asrama (terutama pada sekolah negeri) untuk masyarakat daerah perbatasan yang relatif lebih terpencil dengan biaya asrama yang disubsidi. 	Penduduk usia sekolah yang tinggal di daerah perbatasan yang relatif lebih terpencil dan jauh dari fasilitas sekolah lanjutan.	Pemerintah Daerah, Kanwil Dep. Dikbud, Dinas P dan K, GN-OTA, Penyanggah dana serta pengusaha/perusahaan yang beroperasi dalam eksploitasi SDA di perbatasan (untuk pemberian beasiswa)
Tidak langsung	Tingkat keluarga/komunitas	Kurangnya kesediaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	Memperluas wawasan masyarakat dengan penyediaan fasilitas penerangan	Jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> Program penyuluhan dan penyadaran. 	Masyarakat umum	Pemerintah Daerah, Kanwil Dep. Peningkatan, TVRI, RRI, Universitas setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
		Fasilitas pendidikan yang belum mencukupi terutama untuk SLTP dan SLTA serta fasilitas pendidikan pelatihan lainnya.	Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan.	Jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan atau insentif un-tuk guru di daerah perbatasan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya pada murid. Program SLTP kecil seperti SD kecil. 	Guru-guru di daerah perbatasan, Penduduk usia sekolah di daerah perbatasan yang tinggal jauh dari fasilitas sekolah	Pemerintah Daerah, Kanwil Dep. Dikbud, Dinas P dan K, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kanwil Depnaker, Perusahaan swasta.

Skema 2.1: Sambungan

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	Pelaksana kegiatan
Tidak langsung	Tingkat keluarga/komunitas	Fasilitas pendidikan yang belum mencukupi terutama untuk SLTP dan SLTA serta fasilitas pendidikan keterampilan lainnya.	Meningkatkan kemampuan masyarakat dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan.	Jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> SLTP terbuka dengan program khusus yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Program latihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja serta per-usahaan swasta. 	Guru-guru di daerah perbatasan, Penduduk usia sekolah di daerah yang tinggal jauh dari fasilitas sekolah swasta.	Pemerintah Daerah, Kanwil Dep.Dikbud, Dinas P dan K, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kanwil Depnaker, Perusahaan swasta.
Tidak langsung	Tingkat keluarga/komunitas	Keterbatasan sarana kesehatan untuk melayani masyarakat daerah perbatasan yang semakin kompleks akibat perkembangan daerah dan hubungan dengan negara tetangga	Peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masyarakat dengan memperluas penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.	Jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan tenaga medis/pelayanan kesehatan serta fasilitas lainnya seperti laboratorium kesehatan. Program ambulans untuk merjangkau daerah pedalaman. Peningkatan status Puskesmas di Nunukan menjadi Rumah Sakit Tipe C. 	Masyarakat umum.	Pemerintah Daerah, Dep. Kesehatan.

Skema 2.1: Sambungan

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	
		Kemiskinan	Peningkatan kemampuan dan akses masyarakat untuk berusaha	Jangka menengah	<p>Wilayah perbatasan daratan dengan potensi utama di bidang pertanian, perkebunan dan pengolahan hasil hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pemsayarakatan pertanian intensif (terutama untuk masyarakat petani berpindah). • Program penyuluhan dan pembinaan teknologi pertanian. • Program pemberian kredit lunak untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian. • Penyediaan dana dan pembinaan manajemen untuk perkebunan rakyat yang berskala kecil. • Memberikan prioritas pada penduduk lokal untuk bekerja di perusahaan-perusahaan eksploitasi SDA. • Peningkatan keterampilan untuk wira usaha seperti industri rumah tangga yang mengolah hasil hutan seperti rotan dan kayu. 	<p>Petani peladang berpindah.</p> <p>Masyarakat petani umumnya</p> <p>Petani kecil/miskin</p> <p>Petani perkebunan rakyat.</p> <p>Masyarakat penduduk lokal khususnya.</p> <p>Masyarakat umumnya dan pengusaha industri-rumah tangga khususnya</p>	<p>Pemerintah Daerah, Departemen Pertanian (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, PPL) Bank Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMN, Dep. Koperasi, Lembaga Penelitian Universitas setempat, LSM</p>

Skema 2.1: Sambungan

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	
Tidak langsung	Tingkat keluarga/komunitas	Kemiskinan	Peningkatan kemampuan dan akses masyarakat untuk berusaha	Jangka menengah	<p>Wilayah perbatasan daratan dengan potensi utama di bidang pertanian, perkebunan dan pengolahan hasil hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan pengolahan hasil hutan. <p>Wilayah perbatasan kepulauan dengan potensi utama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Program penyuluhan dan pembinaan teknologi pertanian. Program pemberian kredit lunak untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian. Penyediaan dana dan pembinaan manajemen untuk perkebunan rakyat yang berskala kecil. Kredit sarana perikanan Program alih teknologi pengolahan (hasil laut) sederhana 	<p>Masyarakat umumnya</p> <p>Masyarakat umumnya</p> <p>Masyarakat petani kecil/miskin</p> <p>Petani perkebunan rakyat.</p> <p>Nelayan kecil Nelayan/industri rumah tangga pengolahan hasil laut.</p>	<p>Pemerintah Daerah, Departemen Pertanian (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, PPL) Bank Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMN, Dep. Koperasi, Lembaga Penelitian Universitas setempat, LSM</p>

Skema 2.1: Sambungan

Usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	Pelaksana kegiatan
Tidak langsung	Tingkat keluarga/komunitas	Kemiskinan	Peningkatan kemampuan dan akses masyarakat untuk berusaha	Jangka menengah	<p>Wilayah perbatasan kepulauan dengan potensi utama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana pemasaran hasil perikanan Kredit modal usaha perdagangan. 	<p>Masyarakat umumnya.</p> <p>Masyarakat pedagang/pemilik toko/warung.</p>	<p>Pemerintah Daerah, Departemen Pertanian (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, PPL) Bank Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMN, Dep. Koperasi, Lembaga Penelitian Universitas setempat, LSM</p>
Sebab mendasar	Tingkat masyarakat/nasional	Keterisolasian daerah	Dukungan kebijaksanaan untuk membuka keterisolasian daerah perbatasan	Jangka panjang	<p>Meningkatkan pelayanan transportasi dengan memperluas sarana dan prasarana transportasi darat, sungai dan laut.</p> <p>Penyediaan sarana/prasarana kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi</p> <p>Program transmigrasi</p>	<p>Masyarakat daerah perbatasan umumnya.</p> <p>Masyarakat daerah perbatasan umumnya.</p> <p>Masyarakat pendatang dan penduduk lokal</p>	<p>Pemerintah Daerah, Dept. PU, Dept. Perhubungan, Dept. Kesehatan, Dept. P dan K, Dept. Koperasi, Dept. Transmigrasi, Pengusaha transportasi setempat (khususnya transportasi sungai/laut).</p>

Skema 2.2: Matrik Pendekatan Untuk Pemecahan Masalah dalam Alternatif Strategi Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

Usaha peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	Pelaksana kegiatan
Langsung	Tingkat individu	Pengetahuan, keterampilan serta penguasaan teknologi yang masih rendah.	Memberi pelayanan yang lebih luas pada masyarakat setempat (khususnya penduduk lokal) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi untuk efektif dan tidak merusak lingkungan	Jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk keterlibatan dalam usaha eksploitasi sumberdaya alam setempat. 	Masyarakat umumnya dan penduduk usia kerja serta penduduk lokal khususnya.	Pemerintah Daerah, Perusahaan (Swasta) yang terlibat dalam usaha eksploitasi SDA setempat, BLK Depnaker, Deperindag.
		Keterbatasan modal usaha bagi pengusaha kecil (perkebunan rakyat, industri rumah tangga, serata usaha perdagangan lainnya)	Memberi pelayanan yang lebih luas bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit modal usaha.	Jangka pendek	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian kredit lunak. Penerapan sistem bapak/anak angkat dengan pengusaha besar dan Bank setempat seperti BRI, BNI. 	Pengusaha kecil (lokal) serta kelompok-kelompok masyarakat seperti Pokmas.	Pemerintah Daerah, Bank Pemerintah, Perusahaan Swasta, Dept. Koperasi.

Skema 2.2: Sambungan

Usaha peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur							
Faktor penyebab	Tingkat masalah	Isu pokok	Strategi	Program intervensi	Macam Kegiatan	Kelompok sasaran	Pelaksana kegiatan
Tidak langsung	Tingkat keluarga/komunitas	Sistem usaha yang masih merupakan usaha perseorangan dan kurang berorientasi pasar yang lebih luas.	Penyadaran di tingkat komunitas untuk meningkatkan orientasi dan wawasan berusaha secara lebih komersil agar SDA yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal (mempunyai nilai tambah).	Jangka menengah	<ul style="list-style-type: none"> Program penyuluhan dan penyadaran melalui kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada seperti Pokmas IDT, anggota koperasi dan lain-lain. Penyediaan informasi harga dan permintaan pasar akan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta hasil usaha industri lainnya. 	Pengusaha kecil (lokal), kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada di daerah.	Pemerintah Daerah, Pengusaha Swasta, Deprindag, Dept. pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan, perikanan), Dept. Koperasi, Universitas setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Sebab mendasar	Tingkat masyarakat/nasional	Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan usaha eksploitasi SDA yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum serta kelestarian lingkungan dan SDA setempat.	Dukungan kebijakan dan peraturan pengatur kegiatan eksploitasi SDA dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.	Jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> Ketetapan aturan yang secara eksplisit memberikan sanksi kepada usaha-usaha eksploitasi SDA yang tidak mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya masyarakat lokal serta kelestarian SDA dan lingkungan setempat. 	Pengusaha yang berusaha dalam kegiatan eksploitasi SDA.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi terkait.

4.3. Kendala Pembanguna Daerah Perbatasan

Sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yang umumnya merupakan daerah terpencil, ada beberapa kendala yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Kendala ini berkaitan dengan kondisi geografis, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

- Secara geografis, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, khususnya di kabupaten Bulungan meliputi wilayah yang cukup luas, termasuk wilayah daratan Pulau Kalimantan dan wilayah kepulauan dengan batas laut. Daerahnya perbatasan daratan terdiri dari daerah gunung dan terjal dimana sebagian besar merupakan hutan yang masih sangat lebat. Ini menyulitkan setiap usaha pembangunan di daerah perbatasan, terutama karena minimnya sarana dan prasarana transportasi. Kondisi ini selain menyulitkan usaha pembangunan itu sendiri juga menyulitkan pengawasan dan kontrol terhadap setiap kegiatan pembangunan di daerah perbatasan ini. Selain dari itu, daerah ini juga menjadi kurang menarik untuk investasi selain dengan tujuan utama eksploitasi sumberdaya alam yang masih melimpah.
- Masyarakat daerah perbatasan mempunyai latar belakang sosial dan hubungan kekerabatan yang erat dengan masyarakat di negara tetangga. Hubungan komunikasi yang sudah berjalan secara turun temurun juga memungkinkan masuknya pengaruh-pengaruh dari negara tetangga yang mungkin tidak sesuai dan dapat berdampak negatif terhadap usaha pembangunan di daerah perbatasan.
- Ketimpangan ekonomi antara daerah perbatasan di wilayah Indonesia dengan wilayah negara tetangga juga dapat membuat penduduk daerah perbatasan di wilayah Indonesia lebih berorientasi ke negara tetangga. Selama ini, dalam kegiatan ekonominya masyarakat perbatasan di wilayah Indonesia juga sudah terbiasa dengan pola *patron-client* dimana *patron* tersebut banyak yang merupakan penduduk negara tetangga. Ini dengan sendirinya akan merupakan kendala dalam

setiap usaha di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan Indonesia.

- Tingginya arus mobilitas internasional di daerah perbatasan juga erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti pelintas batas ilegal serta kegiatan penyelundupan, pencurian kayu dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap setiap usaha pembangunan dan keamanan di daerah perbatasan.

BAB V

PENUTUP

Sebagai daerah yang mempunyai ciri-ciri khusus, daerah perbatasan memerlukan perencanaan pembangunan yang khusus. Perencanaan ini tidak saja harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga kepentingan pertahanan keamanan serta kerjasama dengan negara tetangga. Dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, kondisi di daerah perbatasan rawan akan konflik antar negara maupun konflik-konflik internal lainnya.

Daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur merupakan daerah yang kaya akan sumberdaya alam. Tetapi, kondisi ini tidak didukung oleh kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan daerah perbatasan, sehingga kesempatan yang terbuka menarik masyarakat pendatang dari luar daerah perbatasan bahkan dari luar propinsi. Selain dari itu, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, daerah perbatasan ini juga mempunyai karakteristik aliran barang, jasa dan orang antar negara. Dengan kondisi seperti ini, daerah perbatasan mempunyai permasalahan pembangunan yang kompleks.

Penulisan Strategi Alternatif Pembangunan Daerah Perbatasan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Bulungan. Ini dimaksudkan sebagai

asupan untuk pemerintah daerah dalam melihat berbagai alternatif pembangunan daerah perbatasan. Untuk itu diharapkan laporan ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah perbatasan tersebut.

DAFTAR BACAAN

Amin, HM Asli

1997 *Kerjasama Lintas Batas dan Ketenagakerjaan Kalimantan Timur-Sabah Dalam Rangka BIMP-EAGA*. Samarinda: Bappeda Tk I.

Anonim

1992 *Profil Propinsi Republik Indonesia. Kalimantan Timur*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Aswatini dkk.

1994 *Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina di Sulawesi Utara: Pola dan Determinan*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Aswatini (ed).

1995 *Migrasi Kembali Orang Sangir Talaud Dari Pulau-Pulau di wilayah Filipina*. Seri penelitian PPT-LIPI No 2/1995. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Aswatini dkk.

1995a *Migran Sangir di Halmahera: permukiman dan Kehidupannya* Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Propinsi Dati I Kalimantan Timur.

1998 *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama SOSEK MALINDO Kalimantan Timur 1996/1997-1997-1998*. Samarinda.

1996 *Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur Pada SWPKPI Nunukan Mengenai Rencana Teknik Ruang Kota Ibukota Kecamatan Nunukan. Samarinda: (Laporan akhir).*

1993 *Studi pengembangan Kawasan Berikat Nunukan-Kalimantan Timur. Kerjasama dengan Direktorat Pengkajian Sistem Sosial Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Analisis Sistem, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*

Bandiyono, S. dkk.

1996 *Mobilitas Penduduk Perbatasan di Irian Jaya. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.*

1997 *Mobilitas Penduduk Perbatasan Irian Jaya di Wilayah Perbatasan di Wilayah Jayapura. Jakarta Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.*

Biro Pusat Statistik.

1996 *Penduduk Kalimantan Timur. Hasil Survei penduduk Antar Sensus 1995. Jakarta: BPS.*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tim Penyusun Kamus. Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

1990 *Pkamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.*

Heru, Budi Heryahno

1998 *Studi Peningkatan Status Kota-kota Perbatasan (Studi kasus: Kota Nunukan, Kalimantan Timur). Malang: Institut Teknologi Nasional Malang (Tugas Akhir).*

Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi, FE-UI.

1997 *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah. Analisis Supas 95. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.*

Kantor Statistik Kabupaten Bulungan.

1997 *Kbupaten Bulungan Dalam Angka.*

Kantor Statistik Kalimantan Timur.

1996 *Kallimantan Timur Dalam Angka 1995*. Karjasama Bappeda Tingkat I Kalimantan Timur dengan Kantor Statistik Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah Propinsi Daerrah Tingkat I Kalimantan Timur

1995 *Studi Sosio-ekonomi 1984 Daerah Perbatasan I Kecamatan Nunukan*. Samarinda.

Pemda Kabupaten/Dati II Bulungan dan LKBN Antara.

1995 *Pesona dan Tantangan Bulungan*.

Raharto, Aswatini; Suko Bandiyono; Bayu Setiawan; Eniarti Djohan; Herry Yogaswara.

1998 *Mobilias Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan Timur*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoonesia.

United Nations. Department for Economic and Social Infprmation and Policy Analysis.

1995 *Population and Development. Programme of Actions adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-15 September 1994*. Volume I. United Nation Publication Sales NO. E.95.XIII.7.

